

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS SYARAT BARU DAN UNIK DALAM PENGUJIAN  
VARIETAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN  
2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

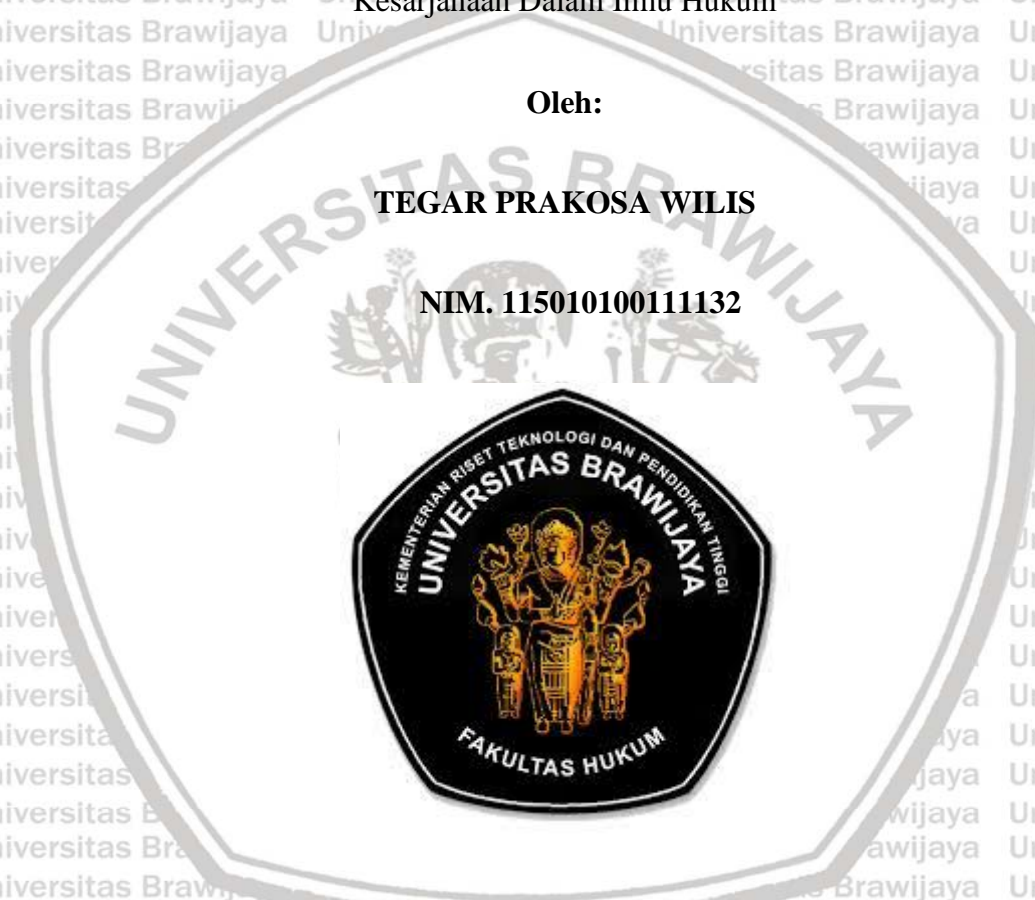
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**TEGAR PRAKOSA WILIS**

**NIM. 115010100111132**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Hak Kekayaan Intelektual .....	16
A.1. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual .....	16
A.2. Tinjauan Umum Konsep Hak Kekayaan Intelektual .....	19
B. Perlindungan Varietas Tanaman .....	22
B.1. Sejarah Perlindungan Varietas Tanaman .....	22
B.2. Konsep Perlindungan Varietas Tanaman .....	29
B.3. Dasar Hukum Perlindungan Varietas tanaman .....	32
C. Tinjauan Umum Pusat PVTTP .....	40
D. Tinjauan Umum Kemiripan Varietas Tanaman .....	41



### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	45
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum .....	47
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	47
F. Definisi Konseptual .....	48

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kriteria Syarat Baru dan Unik Dalam Pegujian Varietas untuk Memperoleh Hak PVT .....	50
A.1. Syarat-syarat umum untuk memperoleh Hak PVT Berdasarkan Konvensi UPOV .....	51
A.1.1. Analisis Pengujian Varietas dalam Menentukan <i>Distinctness</i> , <i>Uniformity</i> dan <i>Stability</i> atau Uji “DUS” Berdasarkan Konvensi UPOV .....	58
A.1.2. Analisis Konsep Baru dan Unik dalam Konvensi UPOV Berdasarkan TGP/9 “ <i>Examining Distinctness</i> ” .....	77
A.2. Bentuk-bentuk Syarat Baru dan Unik Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia .....	96
A.2.1. Syarat-syarat untuk memperoleh Hak PVT berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT .....	97
A.2.2. Analisis Kriteria Syarat Baru dan Unik dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang PVT.....	101
B. Akibat hukum terhadap Pemegang Hak PVT apabila terdapat dua sertifikat Hak PVT yang berbeda tetapi ternyata varietas yang didaftarkan merupakan satu varietas yang sama secara visual dan genetik.....	110
B.1. Beberapa Sistem Pendaftaran Hak dalam HKI .....	110
B.2. Analisis Akibat Hukum terhadap pemegang sertifikat Hak PVT apabila terdapat dua sertifikat Hak PVT yang berbeda tetapi ternyata varietas yang didaftarkan merupakan satu varietas yang sama secara visual dan genetik .....	113



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan .....

117

### B. Saran .....

118

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri bahwa bahan pangan merupakan kebutuhan paling utama bagi semua manusia diseluruh negara di dunia ini, makanan memberikan kita energi serta kekuatan untuk bisa berpikir dan beraktivitas, entah apa yang terjadi jika kita tidak bisa mendapatkan atau menemukan makanan dalam waktu yang lama mungkin kita bisa meninggal dunia, karena itu tidak salah jika makanan masuk dalam kategori kebutuhan primer dalam silsilah kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.

Makmur dan sejahteranya suatu bangsa dapat secara mudah dilihat dari bagaimana masyarakatnya bisa tercukupi oleh asupan makanan yang memiliki nilai gizi atau tidak, jika negara tersebut memiliki masyarakat yang mengalami kelainan tubuh yang disebabkan karena kekurangan gizi, busung lapar atau kelainan lain yang disebabkan kekurangan asupan makanan sudah bisa dipastikan bahwa negara tersebut masuk dalam kategori negara miskin dan tidak sejahtera.

Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi terpenuhinya ketersediaan stok bahan makanan dalam suatu negara tertentu adalah letak astronomis dari negara tersebut, karena dari hal tersebut banyak sebab-sebab yang mempengaruhi proses produksi suatu komoditas bahan pangan, khususnya terkait bahan pangan nabati.

Berdasarkan letak astronomis ini ada penentuan musim dalam suatu wilayah



tertentu. Indonesia memiliki letak astronomis antara  $6^{\circ}$  LU –  $11^{\circ}$  LS dan antara  $95^{\circ}$  BT –  $141^{\circ}$  BT, Berdasarkan letak astronomi ini Indonesia memiliki iklim tropis dengan ciri-ciri memiliki hutan hujan tropis yang cukup luas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, mempunyai penyinaran matahari sepanjang tahun sehingga merupakan negara yang sangat sesuai untuk pengembangan sektor pertanian.<sup>1</sup>

Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah tanah yang berada di negara Indonesia ini terkenal memiliki kesuburan yang luar biasa oleh karena itu sangat mengherankan bilamana sampai terjadi krisis pangan, seperti kelangkaan kedelai, beras atau komoditas lain yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sebenarnya yang salah bukan alamnya, mungkin terdapat sistem atau tata cara pertanian yang perlu dibenahi atau mungkin perlu dilakukan *revitalisasi* supaya dapat memaksimalkan proses produksi.

Perbaikan sektor pertanian merupakan syarat mutlak untuk mencapai ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan guna mewujudkan swasembada pada saat ini dan swasembada berkelanjutan untuk masyarakat Indonesia. Tidak salah jika Presiden Joko Widodo berjanji untuk memperbaiki sektor pertanian Indonesia dan memasukannya dalam agenda kerjanya. Dalam salah kutipan wawancara Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa negara kita kaya akan sumber daya alam, kita negara agraris tetapi faktanya semuanya kita impor, mulai dari beras, gula, kedelai, jagung, dan lain-lainnya, apalagi yang tidak kita impor sekarang ini, padahal sebetulnya ada potensi, ada kemampuan kita untuk

<sup>1</sup> Smart click, *Letak Geografis Indonesia*, diakses dari <http://www.g-excess.com/letak-geografis-indonesia.html>, pada tanggal 10 Febuari 2015 pukul 13.00





swasembada, kekuatan untuk mandiri itu ada tetapi itu tidak kita peroleh karena tidak ada kebijakan publik yang baik dan tepat.<sup>2</sup>

Salah satu aspek yang sangat menentukan dalam mencapai swasembada pangan nasional adalah berupa adanya ketersediaan benih-benih tanaman yang bermutu tinggi untuk para petani. Bayangkan saja jika misalnya petani kita menanam jagung dengan benih jagung biasa, yang waktu panennya memerlukan waktu tiga bulan tetapi mungkin jika menggunakan benih tanaman yang lebih unggul dapat memanen jagung dengan waktu yang lebih singkat, mungkin satu setengah bulan sudah bisa dipanen, hal ini tentu selain dapat mempercepat masa panen, benih unggul juga bisa menekan biaya produksi karena umur tanamannya pendek sehingga para petani dapat menikmati hasil yang lebih banyak lagi. Upaya untuk meningkatkan benih-benih unggul sebenarnya sudah diupayakan sejak sepuluh tahun terakhir oleh berbagai pihak baik pihak swasta atau pemerintah.

Berbagai cara dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penggunaan benih berkualitas mulai dari penyuluhan-penyuluhan kepada petani, seminar-seminar, serta pengembangan varietas-varietas tanaman oleh pemulia tanaman di Balai Penelitian terpadu milik pemerintah selaku lembaga pemerintah yang melakukan perakitan dan penelitian varietas agar tercipta suatu varietas yang lebih unggul serta mempunyai kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Selain pihak pemerintah terdapat juga pihak swasta yang biasanya pemulia tanaman perorangan atau produsen benih tanaman yang

<sup>2</sup> Iris Gera, *Presiden Jokowi: Swasembada Pangan, Salah Satu Cara Tekan Impor*, VOA (Voice of Amerika) Bahasa Indonesia, diakses melalui <http://www.voaindonesia.com/content/presiden-jokowi-swasembada-pangan-salah-satu-cara-tekan-impor/2563965.html> pada tanggal 11 Februari 2015 pukul 15:44





melakukan investasi untuk melakukan penelitian-penelitian terkait perbaikan suatu varietas tanaman.

Saat ini sudah muncul kesadaran pada para petani untuk lebih memilih menanam bibit tanaman yang bermutu dari pada menggunakan sistem tradisional tanap mempertimbangkan kualitas dari bibit tanaman yang kurang baik, Oleh karena itu saat ini telah banyak beredar dipasaran benih-benih varietas tanaman baru yang mempunyai kwalitas yang cukup baik dari tanaman yang telah ada sebelumnya, Kelebihan kelebihan tersebut contohnya seperti benih-benih tersebut mempunyai sistem imunitas yang lebih baik sehingga tidak mudah terserang penyakit, memiliki umur yang lebih pendek sehingga cepat dipanen dan dapat menekan biaya produksi serta memiliki buah dengan berat yang lebih besar.

Seperti kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di sela panen jagung dan kedelai, bertepatan dengan Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan 2014 yang dipusatkan di Dukuh Ngemplak Desa Karangduren Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, Beliau mengatakan bahwa para petani sekarang sudah mempunyai banyak pilihan untuk mencari varietas unggul yang bermutu tinggi, yang cocok dengan lahan dan kondisi cuaca atau musim untuk meningkatkan produksi dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan Povinsi Jawa Tengah.<sup>3</sup>

Semua penemuan varietas tanaman yang ditemukan oleh para pemulia tanaman baik itu oleh pihak Pemerintah, swasta atau pemulia tanaman perongan, tentunya varietas-varietas unggul tersebut ditemukan dengan usaha dan pengorbanan yang cukup besar baik pengorbanan pikiran, waktu dan selain itu

<sup>3</sup> Parida Anggreani, *Gebyar Benih Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Rebong*, diakses melalui <http://pertanian.rejanglebongkab.go.id/gebyar-perbenihan-tanaman-pangan/>, pada tanggal 12 Febuari 2015 pukul 11:22





juga ada biaya yang tidak sedikit yang dikeluarkan untuk penelitian serta uji coba.

Oleh karena itu sudah sepatutnya masyarakat dalam hal ini diwakili oleh negara bisa memberikan penghargaan serta penghormatan terhadap hal tersebut. Seperti karya intelektual lainnya yang terdapat dalam rezim HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dalam penemuan Varietas tanaman juga terdapat peraturan-peraturan yang melindungi serta mengaturnya hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pemulia tanaman yang telah menemukan varietas-varietas yang baru dan terbukti unggul serta memenuhi syarat-syarat yang ada dalam undang-undang.

Untuk melindungi kepentingan hukum pemulia tanaman serta menjamin kepastian hukum iklim investasi di bidang pertanian pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan perlindungan hukum varietas tanaman antara lain Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty On plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian) yang dibuat dengan tujuan untuk menjaga keanekaragaman sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.<sup>4</sup>

Akibat dibuatnya undang-undang tersebut investasi dibidang pertanian dapat terdorong untuk berkempang lagi dan merangsang para anak bangsa dalam menciptakan varietas unggul baru di berbagai komoditas pertanian sehingga

---

<sup>4</sup> Ira Puspita Sari, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Petani Pemulia Tanaman Di Indonesia*, Skripsi diterbitkan 14 januari 2013, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm 2.



mempunyai daya saing tinggi baik dalam pasar dalam negeri atau luar negeri.

Selain itu seperangkat aturan tersebut dapat digunakan untuk memberikan suasana aman bagi investasi dibidang industri pembibitan baik yang bersal dari pemerintah atau swasta.

Karena merasa ada kepastian hukum ini, sekarang sudah mulai banyak produsen-produsen benih tanaman yang ada dan telah sukses memasarkan berbagai produk varietas tanaman untuk para petani. Meskipun sudah terdapat peraturan-peraturan yang mengaturnya tetap saja dalam sektor perbenihan nasional dijumpai berbagai masalah yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hak perlindungan varietas tanaman atau terdapat juga konflik-konflik antara sesama pemegang hak perlindungan varietas tanaman satu sama lain. Seperti kasus yang begitu mengejutkan beberapa tahun yang lalu antara petani asal Nganjuk yang bernama Tukirin (62 tahun) yang dituntut oleh pihak PT.BISI tbk. Sebuah perusahaan benih asing yang berdomisili di Kabupaten Kediri. Tukirin merupakan satu dari sepuluh orang yang dituntut oleh PT. BISI . Pada kasus ini Tukirin dituntut karena diduga telah melanggar pasal 14 ayat (1) Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman terkait dengan masalah sertifikasi.<sup>5</sup>

Kasus diatas merupakan sedikit contoh dari sekian banyak kasus yang telah terungkap ke media mungkin masih terdapat kasus-kasus yang lain, yang belum termuat dalam media. Banyak masyarakat Khususnya kaum petani yang belum memahami konsep dasar HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas

<sup>5</sup> Green Indonesia, *Rice is not a water plant-part 5*, diakses melalui <http://greenindonesia.net/archives/date/2007/23>, pada tanggal 15 Febuari 2015 pukul 08:00.



Tanaman, yang mana hak tersebut memberikan perlindungan hukum dan hak monopoli kepada inventor untuk suatu masa tertentu dengan melarang pihak lain yang tidak terkait untuk memperbanyak, menjual, mempromosikan, serta menggunakan untuk tujuan komersial lainnya atas suatu varietas yang sudah dilindungi hak perlindungan varietas tanaman.

Konsep dasar HKI ini yang tidak begitu dimengerti atau pahami oleh kebanyakan masyarakat khususnya para kaum petani. Pola pikir petani kebanyakan khususnya petani tradisional masih sama seperti dahulu yaitu apa yang mereka tanam dan hasil panen dari tanaman tersebut dianggap sebagai milik kepunyaannya dan mereka merasa bebas melakukan apa saja atas segala hasil yang mereka tanam, tanpa mereka ketahui bahwa benih-benih yang mereka tanam tersebut telah diberi Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Situasi produksi bibit varietas tanaman saat ini berdasarkan penelitian Tantono Subagyo Deputi Manajemen HKI. Bahan Tanaman diteliti serta dirakit oleh pemulia tanaman melalui penelitian bertahun tahun setelah ditemukan varietas baru yang unggul, varietas tersebut didaftarkan ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian serta disertifikasikan, kemudian varietas baru tersebut diproduksi massal untuk dijual pada masyarakat luas, setelah benih tersebut dibeli petani kemudian dibudidayakan oleh petani tersebut, yang terjadi pada kebanyakan kasus para petani yang sudah membeli benih yang telah dilindungi hak Perlindungan Varietas Tanaman, benihnya diperbanyak lagi oleh petani itu sendiri, mungkin pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan penanaman petani itu sendiri namun lama kelamaan bibit tanaman tersebut dipertukarkan dan diperdagangkan oleh petani sehingga akhirnya lama kelamaan



varietas unggul tersebut menjadi milik masyarakat sebelum jangka waktu perlindungan varietas tanaman tersebut habis. Jangka waktu perlindungan varietas tanaman berdasarkan Undang-undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, diberikan dalam jangka waktu 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman tahunan dihitung sejak pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>6</sup>

Selain terdapat Konflik antara petani dan produsen benih, terdapat juga beberapa masalah mengenai kemiripan varietas tanaman oleh beberapa produsen benih. Seperti pada laporan CV. Aura Seed Kediri kepada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. CV. Aura Seed dalam laporannya membahas tentang kemungkinan kemiripan dan penggunaan secara ilegal varietas hak Perlindungan Varietas Tanaman milik CV. Aura Seed oleh beberapa produsen benih.<sup>7</sup> CV Aura Seed mengklaim bahwa ada produsen benih tanaman lain yang memproduksi bibit yang sama atau mirip dengan varietas tanaman yang telah diberi hak Perlindungan Varietas Tanaman oleh CV. Aura Seed.

Terkait dengan Kemiripan Varietas oleh beberapa produsen benih seperti yang dialami oleh CV. Aura Seed, hal ini sangat berkaitan erat serta berhubungan dengan syarat pemberian hak Perlindungan Varietas Tanaman oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

<sup>6</sup> Tantono Subagyo, *Perlindungan HKI Untuk Inovasi Dalam Biologi dan Pertanian*, Deputi Manajemen HKI, Disajikan Dalam Penyuluhan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Deputi manajemen HKI, Kantor Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi, 2001, hlm 17.

<sup>7</sup> Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, *Koordinasi Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Bidang Tanaman*, diakses melalui <http://pvt.setjen.deptan.go.id/ppvtp/berita-733-koordinasi-penanggulangan-pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual-bidang-tanaman.html>, pada tanggal 16 Febuari 2015 pukul 10:12



menyatakan bahwa varietas yang dapat diberikan hak Perlindungan Varietas Tanaman meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama. Dari pasal 2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman tersebut dapat ditafsirkan bahwa hanya varietas baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama yang dapat dimintakan hak Perlindungan Varietas Tanaman. Semua syarat tersebut bersifat kumulatif artinya hak Perlindungan Varietas Tanaman hanya dapat diberikan jika suatu varietas telah memenuhi semua syarat tersebut. Dari uraian pasal tersebut dapat dimungkinkan bahwa dalam kasus kemiripan varietas tanaman terdapat salah satu pihak dari produsen benih tersebut yang kemungkinan melakukan pelanggaran hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Tidak seperti Rezim HKI lainnya yang memberi batasan yang jelas mengenai kemiripan suatu invensi, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman hanya menjelaskan bahwa suatu varietas dianggap unik apabila dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum, bila kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terdapat ketentuan yang mengatur mengenai persamaan pada pokoknya dan persamaan pada merek terkenal. Jika membandingkan antara undang-undang merek dan undang-undang PVT maka dapat dilihat bahwa dalam peraturan merek seolah olah sudah mempersiapkan atau memprediksi bilamana dikemudian hari ada persamaan merek yang dapat merugikan salah satu pihak sehingga hal tersebut bisa diatasi sementara dalam undang-undang perlindungan varietas tanaman belum ada pasal-pasal yang mengantisipasi hal-hal semacam itu atas dasar inilah penulis ingin



melakukan penelitian hukum dengan judul Analisis Yuridis Syarat Baru dan Unik

Dalam Pengujian Varietas Berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000

Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Daftar Penelitian Terkait yang membahas mengenai Hak Perlindungan Varietas Tanaman seperti penelitian yang diangkat oleh penulis ada dua, sebagai berikut:

Skripsi terkait yang pertama.

Judul	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Pemulia Tanaman Di Indonesia
Penulis Skripsi	Ira Puspita Sari Wahyuni
Tahun	2013
Universitas	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Rumusan Masalah	1. Bagaimana konsistensi undang-undang terkait pemulia tanaman di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman? 2. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak petani pemulia tanaman?
Keterangan	Fokus Penelitian pada pengkajian hak-hak petani pemulia tanaman



Skripsi terkait yang kedua.

Judul	Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman
Penulis	Novia Ujianty Silitonga
Skripsi	
Tahun	2008
Universitas	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Rumusan Masalah	1. Bagaimana proses untuk mendapatkan hak perlindungan terhadap varietas tanaman menurut UU No.29 Tahun 2000 tentang PVT ? 2. Bagaimana perlindungan hukum yang didapat para pemegang hak PVT jika terjadi pelanggaran? 3. Hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan berakhirnya perlindungan hukum atas hak PVT?
Keterangan	Fokus penelitian pada pengkajian mekanisme, perlindungan hukum dan berakhirnya hak PVT

Sementara fokus penelitian skripsi ini ada pada pengkajian makna baru dan unik berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman terkait dengan kemiripan varietas oleh beberapa pemegang hak PVT.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas dapat ditarik dua rumusan masala sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah bentuk kriteria atau batasan baru dan unik yang dipakai sebagai syarat permohonan sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pemegang sertifikat Hak PVT apabila terdapat dua sertifikat Hak PVT yang berbeda tetapi ternyata varietas yang didaftarkan merupakan satu varietas yang sama secara visual dan genetik?

## C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapaun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk kriteria atau batasan baru dan unik yang dipakai sebagai syarat permohonan srtifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum terhadap pemegang sertifikat Hak PVT apabila terdapat dua sertifikat Hak PVT yang berbeda tetapi ternyata varietas yang didaftarkan merupakan satu varietas yang sama baik secara visual atau genetik.



#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

##### Manfaat Teoritis

1. Penulisan ini diharapkan bisa memberikan pengaruh dan manfaat atas perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai hak atas kekayaan intelektual lebih khusus lagi tentang perlindungan varietas tanaman.

2. Penulisan penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan referensi bagi penelitian di bidang sejenis lainnya di masa yang akan datang

##### Manfaat Praktis

1. Bagi Pemulia Tanaman

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu para pemulia tanaman dalam mengetahui hak-hak yang di dapat melalui perlindungan varietas tanaman serta perlindungan hukum atas varietas yang sudah dilindungi Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

2. Bagi Petani

Dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan serta pemahaman kepada kaum petani tentang konsep HKI didalam Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

3. Bagi Pemerintah

Dari penulisan ini diharapkan bisa digunakan acuan bagi pemerintah khususnya Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dalam mengatasi



masalah atau konflik yang terkait dengan penggunaan varietas secara ilegal.

## **E. Sistematika Penulisan**

Bila dilihat secara garis besar penulis membagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut ini:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### **2. BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan kajian umum mengenai Sejarah HKI, Konsep HKI, Sejarah PVT, Konsep PVT, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dan Kemiripan varietas tanaman

### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, Jenis dan sumber data, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

### **4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan mengenai analisis dan pembahasan terkait dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) bentuk kriteria atau batasan baru dan unik yang dipakai sebagai syarat permohonan sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman.



- 2) akibat hukum terhadap pemegang sertifikat Hak PVT apabila terdapat dua sertifikat Hak PVT yang berbeda tetapi ternyata varietas yang didaftarkan merupakan satu varietas yang sama baik secara visual atau genetik.

## 5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan uraian mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran yang diberikan berdasarkan permasalahan yang ada.





## BAB II

### Kajian Pustaka

#### A. Hak Kekayaan Intelektual

##### A.1 Sejarah HKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak bisa dibendung lagi mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk mempermudah efektifitas dan efisiensi kinerja manusia. Banyaknya penelitian di dunia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sangat bergantung oleh para investor dan pelaku industri yang menanamkan modalnya untuk riset atau penelitian. Lama kelamaan seiring dengan berjalannya waktu, sektor perekonomian yang berbasis pada perkembangan riset dan teknologi menjadi tidak lagi hanya mengandalkan pendapatan dari sisi penjualan produk hasil riset. Pengaturan atau regulasi atas hasil riset dan teknologi berupa produk atau pemikiran bisa juga mempunyai nilai jual. Salah satu regulasi utama terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah konsep HKI (Hak Kekayaan Intelektual).<sup>1</sup>

Melihat dari sejarahnya pengaturan mengenai HKI pertama kali ada di Venice, Italia yang terkait dengan masalah paten Caxton, Galileo dan Gutenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Semua hukum mengenai paten tersebut kemudian diadopsi oleh Inggris di jaman Tudor ditahun 1500-an. Setelah kejadian tersebut lahirlah hukum paten pertama di Inggris yang disebut dengan

<sup>1</sup> Tim Penelitian Hukum Kemenkumham, *Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Kemenkumham, Jakarta, 2011, hlm 27





*Statute of Monopolies* 1623.<sup>2</sup> Sementara itu Amerika baru memiliki hukum paten ditahun 1791. Usaha untuk mengharmonisasikan HKI pertamakali dilakukan pada tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* yang membahas masalah paten, disain industri dan merek dagang, kemudian setelah itu lahir juga *Berne Convention* untuk masalah *coyright* atau hak cipta.

Adanya konvensi-konvensi tersebut mempunyai tujuan antara lain membuat standarisasi HKI, sarana tukar menukar informasi, saran untuk pembahasan masalah baru serta untuk melindungi konsumen dan produsen yang sudah mendapatkan hak. Setelah terbentuknya *Berne Convention* dan *Paris Convention*, kemudian dibentuklah badan biro administratif yang disebut dengan *the United International Bureau for the Protection of intellectual Property* yang saat ini terkenal dengan naman *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.

Di Indonesia sendiri sejarah HKI dimulai pada tahun 1840-an. Peraturan mengenai HKI pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda tepatnya pada tahun 1844, Hal tersebut terlihat setelah beberapa tahun kemudian pemerintah Belanda mengundang Undang-undang Merek 1885, Undang-undang Paten 1910 dan Undang-undang Hak Cipta 1912<sup>3</sup>, pada saat itu Indonesia masih bernama *Netherland east Indies* yang sudah menjadi anggota *Paris Covention* dan *Berne Convention*. Pada saat masa penjajahan bangsa Jepang segala peraturan yang menyangkut tentang HKI tetap berlaku.

<sup>2</sup> Ibid, hlm.28

<sup>3</sup> DJHKI 2014, *Sekilas Sejarah Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, TENTANG KAMI (online), <http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah>, diakses pada tanggal 17 Maret 2015





Sembenarnya konsep dasar dari HKI sangat bertentangan dengan hukum adat masyarakat Indonesia pada saat ini, hal ini di dasarkan atas konsep dari HKI yang bersifat individual, yang melihat objek dari harta benda tidak hanya terhadap benda yang bisa dilihat oleh mata melainkan juga mengakui adanya objek harta kekayaan yang tidak bisa dilihat langsung/abstrak/tidak berwujud, sedangkan konsep dasar pada hukum adat bersifat komunal yang melihat objek dari harta kekayaan hanyalah segala objek yang dapat terlihat oleh mata, riil, dan berwujud.<sup>4</sup>Sebab itu hal tersebut pada saat era Hindia Belanda HKI tidak diterapkan kepada masyarakat asli Indonesia atau golongan bumiputera.<sup>5</sup>

Pada saat masa kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 atas dasar ketentuan peralihan yang termuat pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini”<sup>6</sup>,oleh karena pasal tersebut maka segala peraturan peninggalan kolonial Belanda termasuk segala peraturan yang menyangkut dengan HKI masih tetap berlaku.

Peraturan-peraturan peninggalan Belanda yang terkait dengan HKI antara lain Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Merek dan Undang-undang Paten.

Namun untuk Undang-undang Paten tidak diberlakukan di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan hukum Indonesia sebab adanya syarat pemeriksaan permohonan Paten yang harus dilakukan di Belanda. Berita yang cukup mengejutkan adalah pada tahun 1958 Indonesia memutuskan untuk keluar dari

<sup>4</sup>Tim Dosen HKI FH UB, *Perlindungan Varietas Tanaman*, Materi Kuliah FH Universitas Brawijaya, <https://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2013/02/6-perlindungan-varietas-tanaman-edited-by-ranitya.pdf>, diakses pada 17 Maret 2015

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945



*Berne Convention* sejak saat itu sampai tahun 1989 tidak pernah ada hak paten yang dikeluarkan oleh pemerintah. Satu-satu Undang-undang HKI yang diperhatikan pemerintah adalah Undang-undang Merek dengan telah diterbitkannya Undang-undang Merek tahun 1961. Undang-undang tersebut mulai diberlakukan pertamakali pada tanggal 11 Noveber 1961. Penetapan Undang-undang Merek tahun 1961 mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari barang-barang bajakan.<sup>7</sup>

Secara mengejutkan karena didorong oleh kepentingan dan politik negara-negara industri seperti Amerika dan para sekutunya pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* berdasarkan Keputusan Presiden No.24 Tahun 1979. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Paris tersebut belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian atau *reservasi* terhadap sejumlah ketentuan seperti pasal 1 s/d 12 dan pasal 28. Pada masa tersebut bisa dikatakan sebagai awal era HKI di Indonesia, hal itu dapat tercermin dengan banyaknya peraturan-peraturan terkait HKI yang dibentuk serta adanya lembaga atau tim khusus dibidang HKI yang bertugas untuk menyusun kebijakan nasional di bidang HKI. Tim ini dikenal dengan nama Tim Kepres 34 yang terbentuk atas Keputusan Presiden No.34

Tahun 1886.<sup>8</sup>

## A.2. Tinjauan Umum Konsep HKI

<sup>7</sup> Ibid, tim dosen HKI FH UB

<sup>8</sup> DJHKI 2014, *Sekilas Sejarah Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, TENTANG KAMI (online), <http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah>, diakses pada tanggal 17 Maret 2015



Konsep dari Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan sebagaimana maknanya dalam pengertian hukum yaitu segala sesuatu yang memiliki sifat kebendaan dan dapat dimiliki, Berdasarkan dengan konsep kekayaan seperti itu hukum mengenalnya dengan sebutan hak milik kebendaan yang tidak berwujud. Spesifikasi ini yang membedakannya dengan hak kebendaan pada umumnya yang bersifat *tangible* atau berwujud seperti rumah, mobil, perhiasan dan benda-benda lain yang dapat terlihat langsung oleh mata.

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut diatas maka HKI tidak bisa dikuasai secara fisik oleh pemiliknya. HKI hanya bisa dikuasai melalui klaim atau tindakan hukum, maksudnya kepemilikannya hanya tertulis dan tercatat dalam bentuk format hak serta pelaksanaan memerlukan tindakan hukum, terutama apabila muncul ancaman atas hak tersebut. Karena itu HKI tidak hanya membutuhkan adanya pengakuan dan penghargaan tetapi juga memerlukan perlindungan.<sup>9</sup>

Pengakuan dan penghargaan atas HKI dalam praktiknya hanya akan tampil dalam bentuk perlakuan yang sesuai dengan tatanan, etika dan moral masyarakat. Sebenarnya yang lebih penting lagi dari hal tersebut adalah kesediaan warga masyarakat untuk mau memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pemilik HKI dengan cara tidak menggunakan atau memanfaatkan suatu invensi atau penemuan tanpa persetujuan dari pemiliknya.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Rahayu Kartini, *Kajian Implementasi Prinsip-prinsip Perlindungan HKI Dalam Peraturan PerUUan HKI di Indonesia*, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/805>, diakses pada tanggal 17 Maret 2015

<sup>10</sup> Ibid



Rezim HKI adalah suatu hal yang cukup baru bagi hampir seluruh negara di dunia, tidak hanya pada negara-negara berkembang. Segala peraturan mengenai HKI selalu dipaksa untuk mengikuti perkembangan teknologi yang dibawa oleh para pencipta atau inventor. Para pembuat UU di seluruh dunia berusaha untuk mengikuti perkembangan baru dibidang teknologi komputer dan internet sebagai bentuk usaha untuk melindungi kepentingan pencipta. Para Hakim juga sering berusaha untuk menselaraskan serta menyesuaikan ciptaan dan invensi yang baru kedalam prinsip-prinsip dasar dan tradisional dari HKI. Peraturan-peraturan mengenai HKI sering menampung mengenai apa yang muncul dan selalu berubah-ubah dan mengatur antara apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilindungi. Oleh karena itu HKI adalah salah satu cabang hukum yang paling banyak dikritik inisiatif untuk mengadakan pembaharuan terus diusulkan oleh para ahli di seluruh dunia.<sup>11</sup>

Ruang lingkup perlindungan HKI terbagi atas beberapa bidang penting seperti Hak Cipta, Paten serta Merek. Namun secara garis besar HKI terbagi atas Hak Cipta (Copyrights) dan hak kekayaan perindustrian.<sup>12</sup> Hak Cipta terdiri dari Hak Cipta itu sendiri dan hak-hak terkait (Neighbouring Rights). Sementara itu hak kekayaan perindustrian terbagi menjadi:

1. *Patent*
2. *Utility Models*
3. *Industrial Designs*

<sup>11</sup> Tim Lindsey, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar*, PT.Alumni, Bandung, 2013, hlm 2

<sup>12</sup> Redaksi, *Indonesia Perlu Perhatikan Hak Milik Intelektual*, Kompas, Jakarta, 19 Febuari 1996, hlm.1, diakses melalui [http:// www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id) pada tanggal 16 Maret 2015.



4. *Trade Secrets*
5. *Trade Marks*
6. *Service Marks*
7. *Trade Names or Comercial Names*
8. *Appelations of Origin*
9. *Indications of Origin*
10. *Unfair Copetition Protection*
11. *New Varieties of Plant Protection*
12. *Integrated Circuits*<sup>13</sup>

Bidang HKI yang berkaitan erat dengan Hak Cipta antara lain adalah Disain Industri dan hak-hak terkait dengan Hak Cipta Sementara itu yang memiliki kesamaan dengan Merek adalah Indikasi Geografis dan Indikasi Asal, Bidang HKI lainnya yang memiliki konsep yang sama adalah antara Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas tanaman dengan Paten.<sup>14</sup>

Adanya kemiripan atau kesamaan konsep diantara bidang HKI tersebut ditandai dengan adanya elemen atau unsur misalnya estetika dan seni, tanda dan indikasi serta teknologi dan formula. Sedangkan perbedaan konsepsi diakui karena adanya persyaratan-persyaratan formal yang harus dipenuhi seperti contohnya prosedur pendaftaran pada paten sementara pada rahasia dagang sama sekali atau bahkan tidak ada ketentuan untuk didaftarkan

## **A.2.1 Perlindungan Varietas Tanaman**

### **A.2.1.1 Sejarah Perlindungan Varietas Tanaman**

<sup>13</sup> Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, RajaGrafindo Persada, 2006, Jakarta, hlm.16.

<sup>14</sup> Ibid, Rahayu kartini





Sebelum mengkaji lebih dalam konsep dan materi tentang Perlindungan Varietas Tanaman, terlebih dahulu penulis jelaskan makna dari kata perlindungan dan varietas tanaman. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung atau perbuatan (hal dsb) melindungi.<sup>15</sup> Sedangkan dilihat dari kacamata hukum perlindungan menurut salah seorang pakar hukum terkenal yang berasal dari Belanda yang bernama E.Utrecht perlindungan diartikan sebagai “Himpunan petunjuk hidup ( Berupa larangan-larangan dan perintah-perintah) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan sudah seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan dengan konsekwensi bila tidak dijalankan atau ditaati (terjadi pelanggaran) dapat menimbulkan tindakan hukum dari pemerintah untuk menindak hal itu.<sup>16</sup>

Kata Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji dan ekspresi karakteristik genotipe dan/atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),Varietas diartikan sebagai perubahan rupa yang

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Perlindungan, Kamus Besar Bahasa Indonesia *Versi Online/ daring( dalam jaringan*, <http://http://kbbi.web.id/lindung>, diakses 16 Maret 2015

<sup>16</sup> Syahrudin Husein, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kelompok studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1998, hlm.7

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman



menurun sedangkan Tanaman diartikan segala yang hidup yang ditandai akar, batang, daun, dsb.<sup>18</sup>

Dalam rezim Perlindungan Varietas Tanaman, varietas yang diberi perlindungan adalah varietas baru yang diciptakan melalui perakitan yang lazim proses pemuliaan tanaman. Pemuliaan Tanaman adalah serangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.<sup>19</sup> Orang yang melakukan kegiatan pemuliaan tanaman disebut sebagai Pemulia Tanaman.<sup>20</sup>

Segala regulasi mengenai Perlindungan Varietas Tanaman merupakan perkembangan dari bidang hukum yang ingin menciptakan hak-hak baru untuk menegaskan dan memperkuat model perlindungan atas ide berupa penyampaian konsep mengenai hak yang baru.<sup>21</sup> Dalam melakukan kegiatan pemuliaan tanaman harus menggunakan metode yang baku sehingga dapat diciptakan suatu varietas yang baru dan bisa mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan atas dasar hal ini istilah pemuliaan tanaman juga bisa diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau usaha untuk mempertahankan kemurnian varietas atau jenis tanaman yang sudah ada atau menghasilkan varietas baru yang memiliki sifat-sifat yang

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Varietas dan Tanaman, Kamus Besar Bahasa Indonesia *Versi Online/ daring/ dalam jaringan*, <http://kbbi.web.id/lindung>, diakses 16 Maret 2015

<sup>19</sup> Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

<sup>20</sup> Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

<sup>21</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1985, hlm. 111





lebih baik dari varietas sejenis sebelumnya.<sup>22</sup> Sementara itu menurut Amir Makmur dalam bukunya berjudul Pengantar Pemuliaan Tanaman, Pemuliaan diartikan sebagai suatu metode yang secara sistematis merakit keanekaragaman genetik menjadi satu bentuk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>23</sup>

Banyak hal yang dibutuhkan oleh pemulia tanaman untuk melakukan kegiatan pemuliaan tanaman. Selain masalah biaya yang tidak sedikit. Secara teknis terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan pemuliaan tanaman, antarlain: adanya keragaman genetik, sistem-sistem yang logis dalam pemindahan dan fiksasi gen, konsepsi dan tujuan atau sarana yang jelas serta mekanisme penyebarluasan hasil kepada masyarakat.<sup>24</sup> Jika sudah memperoleh keanekaragaman genetik melalui proses persilangan perkawinan, setelah itu dibuatlah suatu tindakan isolasi atau pemisahan antara satu spesies dan diadakan pengembangan secara terpisah antara genotipe yang terpilih, Penelitian dan pengujian dibutuhkan untuk memilih genotipe yang terbaik, hal tersebut dilakukan dengan cara mengukur pengukuran fenotipe individu atau kelompok individu sejenis, cara melihat keragaman genotipe suatu varietas dilakukan dengan cara perkawinan tanaman untuk memperbanyak.<sup>25</sup> Sedangkan tujuan utama dari kegiatan pemuliaan tanaman adalah untuk memperoleh atau mengembangkan varietas atau hibrida agar lebih efisien dalam menggunakan

<sup>22</sup> Novia Ujianty Silitonga, *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas*, Skripsi diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008, hlm.16

<sup>23</sup> Amir Makmur, *Pengantar Pemuliaan Tanaman*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.11

<sup>24</sup> Hasan Basri, *Dasar-Dasar Agronomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm.63

<sup>25</sup> Novia Ujianty Sitonga, op.cit, hlm.17



unsur hara sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal per satuan luas dan menguntungkan penanam atau pengguna.<sup>26</sup>

Dalam melakukan kegiatan pemuliaan tanaman, subjek utama yang harus mendapatkan prioritas perlindungan hukum adalah para pemulia tanaman yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan pemuliaan tanaman, sedangkan yang menjadi objek dalam kegiatan pemuliaan tanaman adalah suatu varietas tanaman.

Pengertian varietas tanaman menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman diartikan sebagai sekelompok tanaman dari satu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakter genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.<sup>27</sup>

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kegiatan pemuliaan tanaman adalah adanya dana-dana investasi yang bisa digunakan untuk penelitian. Negara-negara yang sudah banyak melakukan investasi pasti akan memberikan suatu hak eksklusif dalam bentuk hak pemulia (*Breeder Rights*) kepada pemulia tanaman. Hal itu harus dilakukan untuk menjamin pengembalian keuntungan dari investasi yang akan ditanamkan oleh para investor dan pemulia tanaman baik investasi materi, pikiran dan waktu. Jika ada jaminan hukum yang kuat para investor tidak akan ragu lagi untuk menanamkan modalnya pada kegiatan pemuliaan tanaman

<sup>26</sup> Soemarjo Poespodarsono, *Dasar-Dasar Ilmu Pemuliaan Tanaman*, Pusat Antar Universitas Institut Pertanian Bogor, Bogor, 1988, hlm.1

<sup>27</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman





dan para pemulia tanaman dapat terpacu lagi untuk bisa menemukan varietas-varietas baru yang lebih unggul lagi.

Seperti halnya perlindungan dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya, segala peraturan tentang hak pemulia tanaman yang selalu diusahakan untuk bisa menyeimbangkan antara kepentingan umum (dalam hal ini adalah konsumen benih atau masyarakat) dengan kepentingan privat (dalam hal ini adalah para pemulia tanaman. Jika tidak terdapat perlindungan hukum maka perusahaan-perusahaan benih bisa mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak ada jaminan pengembalian dana-dana investasi untuk kegiatan pemuliaan tanaman, adanya tindakan saling klaim kepemilikan oleh para pemulia tanaman serta akan ada penggunaan varietas secara ilegal mengingat suatu varietas tanaman sangat mudah diproduksi ulang oleh karena itu tanpa adanya jaminan perlindungan hukum akan terbuka peluang bagi pihak pihak lain untuk mencuri dan memproduksi suatu varietas tanaman serta menjualnya dengan harga yang murah atau rendah tanpa harus melakukan kegiatan pemuliaan tanaman yang memakan waktu lama serta biaya yang besar.<sup>28</sup>

Pada awalnya sejarah Perlindungan Varietas Tanaman dimulai dari adanya *Medel's Genetic Law* 1900, sejak saat itu negara-negara seperti Prancis, Inggris dan Italia memintakan perlindungan terhadap produk tanaman, sementara di Amerika baru ada aturan khusus yang menyangkut Perlindungan Varietas Tanaman pada tahun 1930, peraturan tersebut dikenal dengan the United State

<sup>28</sup> Novia Ujianty Sitonga, op.cit, hlm.19



Patent Act 1930.<sup>29</sup> Meskipun sudah terbentuk berbagai peraturan yang terkait dengan perlindungan varietas tanaman hal tersebut dirasa masih jauh dari kata cukup, oleh karena itu pada tahun 1960 dibuatlah kesepakatan antara beberapa negara di dunia untuk membentuk konvensi internasional mengenai perlindungan varietas tanaman. Semua kesepakatan tersebut tertuang dalam *International Convention For the Protection of Varieties of Plant*, yang sekarang dikenal dengan *UPOV (Union Internationale Pour La Protection Des Obtentions Vegetable)*.<sup>30</sup> Sedangkan pada perlindungan yang terkait dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Genetik dan Ekosistem, Setelah itu dibuat lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman kemudian diikuti dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan dan Tanaman.<sup>31</sup>

Semua peraturan tersebut masih dirasa sangat kurang melindungi kepentingan para pemulia tanaman karena semua peraturan diatas hanya bersifat tersirat, serta tidak ada perlindungan yang jelas terhadap suatu varietas baru. Pada saat itu Indonesia juga terdesak oleh WTO dan TRIPs, yang mana didalam aturan TRIPs mengharuskan anggotanya untuk memberikan perlindungan varietas tanaman baik melalui Paten, *Sui Generis* atau Kombinasi paten dan *Sui*

<sup>29</sup> Krisnani Setyowati, *Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman*, disampaikan pada training of the trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2001, hlm.39

<sup>30</sup> Tim Dosen HKI FH UB, *Perlindungan Varietas Tanaman, Materi Kuliah FH Universitas Brawijaya*, <https://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2013/02/6-perlindungan-varietas-tanaman-edited-by-ranitya.pdf>, diakses pada 17 Maret 2015

<sup>31</sup> Daniel Aling, *Perlindungan Paten Atas Varietas Baru Tanaman Pada Sektor Pertanian di Indonesia*, Karya ilmiah diterbitkan secara online, Manado, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2010, hlm.4



Generis.<sup>32</sup> Akhirnya pada tahun 2000 dibentuklah Undang-Undang Nomor 29

Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang ini sudah mengatur secara rinci mengenai Perlindungan Varietas Tanaman, tentang sanksinya bagi para pelanggar, tentang syarat syarat suatu varietas bisa dimintakan Perlindungan Varietas Tanaman, mengenai lembaga yang berwenang memberikan izin pengeluaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman Serta hal-hal lain yang tidak terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

#### **A.2.1.2 Konsep Perlindungan Varietas Tanaman**

Seperti di dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang terdapat hak monopoli atau eksklusifitas atas ciptaan atau invensi dalam Hak Perlindungan Varietas Tanaman juga terdapat hak eksklusifitas yang sama. Berdasarkan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, hak eksklusif pemegang hak PVT tersebut berupa kebebasan untuk melakukan kegiatan:

1. Memproduksi atau memperbanyak benih;
2. Menyimpan untuk tujuan propagasi;
3. Mengiklankan ;
4. Menawarkan;
5. Menjual atau memperdagangkan;
6. Mengekspor;
7. Mengimpor;

<sup>32</sup> Tim Dosen HKI FH UB, Perlindungan Varietas Tanaman, Materi Kuliah FH Universitas Brawijaya, <https://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2013/02/6-perlindungan-varietas-tanaman-edited-by-ranitya.pdf>, diakses pada 17 Maret 2015



8. Mencadangkan untuk keperluan sebagai mana dimaksud dalam butir 1,2,3,4,5,6, dan 7.<sup>33</sup>

Adanya hak eksklusif dari pemulia tanaman atas varietas yang sudah dilindungi hak Perlindungan Varietas Tanaman mempunyai implikasi hukum bahwa barang siapa menggunakan varietas yang sudah dilindungi Hak Perlindungan Varietas

Tanaman Tanpa seijn pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman, maka orang tersebut sudah melakukan pelanggaran atas Hak Perlindungan Varietas

Tanaman. Namun terdapat beberapa ketentuan yang mengecualikan suatu penggunaan varietas tanpa izin tetapi bukan merupakan suatu pelanggaran,

adapun perbuatan tersebut seperti yang dilukiskan dalam pasal 10 ayat

(1) Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas

Tanaman menyatakan bahwa:

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak Perlindungan Varietas Tanaman,

Apabila:

1. Penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
2. Penggunaan varietas yang dilindungi untuk tujuan penelitian, pemuliaan tanaman dan perakitan varietas baru;
3. Penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan

<sup>33</sup> Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman



memperhatikan hak-hak ekonomi dari memegang hak Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>34</sup>

Orang-orang yang tidak memiliki hak Perlindungan Varietas Tanaman masih bisa melakukan hal-hal sebagaimana yang tersebut dalam pasal 6 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dengan cara melakukan perjanjian lisensi dengan pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman seperti yang termuat dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor

29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Selain lisensi hal lain yang bisa membuat Hak Perlindungan Varietas Tanaman berpindah tangan atau kepemilikannya seperti yang terlihat dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman,

Hak Perlindungan Varietas Tanaman dapat beralih atau dialihkan karena:

- a) Pewarisan;
- b) Hibah;
- c) Wasiat;
- d) Perjanjian dalam bentuk akta notaris;
- e) Sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang.<sup>35</sup>

Terdapat perbedaan antara peralihan Hak melalui lisensi berdasarkan pasal 42 dengan peralihan hak karena hal-hal yang termuat dalam pasal 40 ayat (1). Jika peralihan hak melalui lisensi pada umumnya hanya memberikan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari hak Perlindungan Varietas Tanaman dengan

<sup>34</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

<sup>35</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman



jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Sedangkan pada pengalihan hak yang berdasarkan pasal 40, selain mengalihkan hak-hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari hak Perlindungan Varietas Tanaman diikuti juga dengan pengalihan kepemilikan hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Dalam hak kebendaan terdapat sifat absolut dalam arti bisa dipertahankan kepada siapa saja, terdapat prinsip *droit de suit*, hak tersebut selalu melekat pada yang mempunyai hak sehingga dapat dipertahankan pada siapapun dan ada juga prinsip *droit de preferent* yang memiliki makna bahwa hak yang lahir lebih dulu memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari pada hak kebendaan yang baru lahir setelah hak tersebut.<sup>36</sup>

Segala konsep dasar hak kebendaan sebagaimana yang dikutip dari buku berjudul Mencari Sistem Hukum Benda Nasional karangan Mariam Darus sebenarnya juga terdapat dalam hak Perlindungan Varietas Tanama. Namun terdapat perbedaan pada hak eksklusif yang dimiliki hak Perlindungan Varietas Tanaman yang diberikan oleh negara kepada pemegangnya. Hak ini hampir sama dengan hak monopoli suatu invensi atau ciptaan varietas baru dimana pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman berhak melarang siapa saja yang ingin menggunakan varietasnya yang sudah dilindungi untuk tujuan komersial.

### A.2.1.3 Dasar Hukum Perlindungan Varietas Tanaman

Pada dasarnya segala peraturan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan(HKI) Intelektual berasal dari luar Indonesia, Hal itu terlihat dengan semua peraturan tentang HKI yang berlaku di Indonesia dibuat karena desakan

<sup>36</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN, Alumni, Bandung, 1997, hlm 43



negara-negara maju (negara barat) dengan mengatas namakan kepentingan organisasi-organisasi Internasional yang berprinsip demi kemajuan bersama umat manusia, atas dasar kepentingannya negara maju tersebut memaksa negara berkembang untuk meratifikasi peraturan-peraturan yang dibuatnya.

Sejak lahirnya *International Covention for the Protection of New Varieties of Plant* atau yang sekarang populer dengan nama UPOV merupakan cikal bakal terbentuknya peraturan peraturan yang terkait dengan perlindungan varietas tanaman baru. Sementara itu perlindungan varietas tanaman di Indonesia dimulai pada tahun 1989 dengan menggunakan perlindungan Paten, dalam Undang Undang Paten tersebut dijelaskan bahwa perlindungan Paten tidak bisa diberikan kepada objek yang berupa makanan, minuman, dan varietas tanaman khususnya terhadap komoditas tanaman Padi, Jagung, Ubi kayu dan Ubi jalar.<sup>37</sup> Undang Undang Paten 1989 dianggap tidak bisa melindungi kepentingan pemulia tanaman secara memadai karena ada batasan-batasan terhadap varietas-varietas tertentu, karena itu pemerintah pada tahun 1997 membuat amandemen atas beberapa ketentuan yang dirasa memberatkan kepentingan pemulia tanaman, amandemen tersebut berupa pencabutan dan/atau penghapusan terhadap larangan perlindungan paten atas makanan, minuman dan varietas tanaman. Atas dasar hal inilah terbentuklah Undang Undang Paten Tahun 1997 yang mengizinkan makanan, minuman dan varietas tanaman mendapatkan perlindungan Paten.<sup>38</sup>

Sebenarnya desakan terbesar atas amandemen atau perubahan dari Undang-Undang Paten 1989 bukan berasal dari pemulia tanaman atau pemerintah

<sup>37</sup> Pasal 7 Huruf c Undang Undang Paten Tahun 1989

<sup>38</sup> Novia Ujianty Sitonga, op.cit, hlm 29



Indonesia sendiri melainkan karena desakan dari negara-negara barat yang ingin melindungi produk-produknya yang beredar di Indonesia. Hal ini diawali dengan keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi ketentuan *TRIPs* (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) yang dinyatakan dalam ketentuan *TRIPs* pada pasal 27 ayat (3) huruf b:

*"However, member shall provide for the protection of plants varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof".<sup>39</sup>*

Ketentuan *TRIPs* tersebut diatas bila kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia menyatakan bahwa *TRIPs* mewajibkan seluruh negara-negara yang menjadi anggota *TRIPs* supaya memberikan perlindungan untuk varietas tanaman baru, bisa melalui paten, sistem *sui generis* atau yang lebih khusus lagi mengatur itu atau bisa menggunakan kombinasi paten dan *sui generis*.

Dengan adanya ketentuan *TRIPs* diatas maka dimulailah era awal perlindungan varietas tanaman di Indonesia dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem. Kemudian menyusul juga Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman yang kemudian memompa semangat para pemulia tanaman untuk melakukan penelitian guna bisa menemukan varietas yang lebih baik dengan dasar pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Yang menyatakan:

<sup>39</sup> Andriana Krisnawati, *Perlindungan Hukum Varietas Tanaman*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 23





- 1) Kepada penemu teknologi tempat serta teori dan metode ilmiah baru dibidang budidaya tanaman dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah.
- 2) Kepada penemu jenis baru dan/atau varietas unggul, dapat diberikan penghargaan oleh pemerintah serta mempunyai hak memberi nama pada temuannya.
- 3) Setiap orang atau badan hukum yang tanamannya memiliki keunggulan tertentu dapat diberi penghargaan oleh pemerintah.
- 4) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh pemerintah.<sup>40</sup>

Sementara itu sasaran atau tujuan dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Tersirat dalam pasal 3 sebagai berikut:

- a) Meningkatkan dan memperluas penganekaraman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri dan memperbesar ekspor;
- b) Meningkatkan pendapatan taraf hidup petani;
- c) Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.<sup>41</sup>

Lingkup perlindungan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman meliputi proses kegiatan produksi sampai dengan pasca panen, dalam penjelasan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman secara khusus dijelaskan proses kegiatan produksi meliputi semua kegiatan yang dimulai dari kegiatan penyiapan

<sup>40</sup> Pasal 55 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman

<sup>41</sup> Pasal 3 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman





lahan dan media tumbuh tanaman, pembenihan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan tanaman serta panen sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan pasca panen adalah kegiatan yang dimulai sesudah panen sampai pada hasilnya siap dipasarkan.<sup>42</sup> Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman dijelaskan bahwa sistem Budidaya Tanaman diartikan sebagai sistem pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang baik guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.<sup>43</sup>

Walaupun sudah dibentuk Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman tetap saja peraturan ini dirasa masih kurang mencukupi kebutuhan perlindungan hukum atas suatu varietas tanaman, hal ini disebabkan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman belum mengatur adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki pihak pemulia tanaman sehingga para pemulia tanaman tidak bisa memahami keuntungan dan manfaat yang diperoleh jika varietas tersebut diperbanyak atau dijual dan belum ada sanksi yang mengatur mengenai bilamana ada penggunaan varietas tanpa memperoleh izin dari pencipta varietas tersebut untuk tujuan komersial. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman hanya memberikan penghargaan melalui pemerintah kepada penemu atau pencipta varietas baru dalam hal ini adalah para pemulia tanaman yang telah menciptakan varietas baru dan unggul.

<sup>42</sup> Ira Puspita Sari, op.cit, hlm 27

<sup>43</sup> Pasal 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman





Kurang memadainya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman jelas sangat mempengaruhi kepercayaan investor asing yang akan menanamkan modalnya di sektor pertanian. Karena itu atas kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) yang dilakukan pada tahun 1994 dalam perjanjian GATT terdapat kesepakatan bahwa setiap anggota WTO (*World Trade Organization*) diwajibkan untuk meratifikasi kesepakatan yang termuat dalam TRIPs. Pada intinya dalam kesepakatan ini setiap anggota WTO harus menyesuaikan atau menyelaraskan segala peraturan peraturan yang terkait dengan HKI (Hak Kekayaan Intelektual), meliputi Hak Cipta, Merek, Paten serta pengaturan mengenai Perlindungan Varietas Tanaman dengan disesuaikan kesepakatan TRIPs.<sup>44</sup>

Untuk melengkapi peraturan peraturan yang terkait dengan Perlindungan Varietas Tanaman agar bisa selaras dengan kesepakatan TRIPs, maka dibuatlah Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang berlaku pada tanggal 20 Desember 2000, penyebab utama diundangkannya peraturan ini adalah untuk mendorong dan memotivasi para peneliti dibidang pertanian khususnya para pemulia tanaman supaya bisa meningkatkan hasil penelitiannya sehingga bisa tercipta suatu varietas baru yang mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul dari sebelumnya, selajutnya pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian yang memiliki daya saing ditingkat internasional.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Ira Puspita Sari, op.cit, hlm 29

<sup>45</sup> Tim Lindsey, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar*, PT.Alumni, Bandung, 2013, hlm 231



Dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman sudah dijelaskan secara lengkap tata cara pengajuan hak Perlindungan Varietas Tanaman, syarat-syarat pengajuan hak Perlindungan Varietas Tanaman serta sanksi terhadap penggunaan varietas tanpa memperoleh izin dari pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman meliputi varietas tanaman yang memiliki sifat-sifat tertentu yang diatur dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman seperti yang tertulis dalam pasal 1 angka 3 sebagai berikut:

“Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan”.<sup>46</sup>

Varietas tanaman seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 untuk bisa mendapat kan hak Perlindungan Varietas Tanaman haruslah varietas yang berasal dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama.<sup>47</sup> Syarat-syarat tersebut biasa disebut dengan istilah BUSS. Nilai atau makna

<sup>46</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

<sup>47</sup> Pasal 2 Angka 1 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman



baru dari suatu varietas termuat dalam pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 29

Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebagai berikut uraiannya:

“Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari satu tahun, atau telah diperdagangkam diluar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan”.<sup>48</sup>

Kemudian makna unik dari varietas termuat dalam pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebagai berikut uraiannya:

“Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT”.<sup>49</sup>

Kemudian makna seragam dari varietas termuat dalam pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebagai berikut uraiannya:

“Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda”.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Pasal 2 Angka 2 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

<sup>49</sup> Pasal 2 Angka 3 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman



Kemudian makna stabil dari varietas termuat dalam pasal 2 ayat (5) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebagai berikut uraiannya:

“Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut”.<sup>51</sup>

Sementara dalam pemberian nama suatu varietas harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam pasal 2 ayat (6) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebagai berikut uraiannya:

- a) Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis;
- b) Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
- c) Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT;
- d) Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;
- e) Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;

<sup>50</sup> Pasal 2 Angka 4 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

<sup>51</sup> Pasal 2 Angka 5 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman



- f) Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>52</sup>

Meskipun suatu varietas bisa diberi hak Perlindungan Varietas Tanaman karena varietas tersebut sudah memenuhi semua persyaratan BUSS dan sudah diberi nama, Namun terdapat ketentuan dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang ada varietas tertentu yang tidak bisa diberi Hak Perlindungan Varietas Tanaman dijelaskan bahwa varietas yang tidak bisa diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.<sup>53</sup>

Terdapat jangka waktu tertentu dalam Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang diberikan negara, jangka waktu tersebut dibedakan menjadi dua, untuk tanaman semusim jangka waktu Hak Perlindungan Varietas Tanaman diberikan selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Sedangkan untuk tanaman tahunan jangka waktu Hak Perlindungan Varietas Tanaman diberikan selama 25 (dua puluh lima) tahun dihitung sejak tanggal pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>54</sup> Setelah jangka waktu Hak Perlindungan Varietas Tanaman habis varietas tanaman tersebut menjadi *Publik Domain* (Milik umum), setiap orang sudah bebas untuk menggunakannya untuk kegunaan komersial secara pribadi tanpa harus meminta izin dari pihak yang memiliki Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

<sup>52</sup> Pasal 2 Angka 6 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

<sup>53</sup> Pasal 3 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

<sup>54</sup> Pasal 4 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman



### A.3 Tinjauan Umum Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian terbentuk atas dasar Peraturan Menteri Pertanian nomor 61/Permentan/OT.140/11/2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Instansi ini merupakan penggabungan dua unit eselon II Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (Pusat PVT) dan Pusat Perizinan dan Investasi (PPI). Tujuan dari penggabungan ini adalah untuk menyediakan pelayanan public yang semakin efektif dan efisien bagi para pengguna. Terhitung sejak 1 Desember 2010, kedua Pusat tersebut berubah nama menjadi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVT) dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.<sup>55</sup>

Salah satu alasan lain dibentuknya lembaga ini adalah untuk mengatasi persaingan bebas di era globalisasi saat ini, kita harus mampu menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing, hasil-hasil pertanian kita harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh pasar global. Serta untuk menjaga kepercayaan konsumen produk-produk pertanian harus disediakan sebanyak yang dibutuhkan oleh pasar dan berkelanjutan terus menerus. Karena itu peran Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menjadi sangat penting ketika sektor pertanian kita diharapkan pada peningkatan daya saing produk pertanian Indonesia, sebagai bagian dari penghargaan kekayaan intelektual, Sistem Perlindungan Varietas Tanaman memberikan kepastian hukum bagi semua

<sup>55</sup> Suharyono, Pengantar Kepala Pusat, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, <http://ppvt.setjen.pertanian.go.id/ppvtp/statis-14pengantarkepalapusat.html>, diakses 19 Maret 2015



pemilik varietas unggul, sehingga bisa meningkatkan keberlanjutan inovasi dan pengembangan pemuliaan tanaman serta memberikan dukungan penuh untuk perkembangan dunia pertanian pada umumnya.

Seperti yang tergambar dalam Visi dan Misi yang hendak dicapai oleh Pusat PVTTP, adapun visi dari Pusat Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian Tanaman untuk mewujudkan Pusat Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTTP) sebagai institusi pelayanan publik yang professional, berintegritas, cepat, akurat dan akuntabel.<sup>56</sup> Sementara Misi dari Pusat PVTTP ada empat yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Sumber Daya Manusia (SDM) Pusat PVTTP yang professional dan berintegritas;
2. Menyempurnakan sarana dan prasarana pada Pusat PVTTP menuju standar nasional dan Internasional;
3. Mengembangkan dan menyempurnakan prosedur pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
4. Mengimplementasikan manajemen pelayanan public berbasis teknologi informasi dan komunikasi.<sup>57</sup>

#### A.4 Tinjauan Umum Kemiripan Varietas Tanaman

Dalam bahasa Inggris kemiripan sama dengan *equality* yang memiliki arti *fact of being equal in rights, status, advantages*.<sup>58</sup> Sementara dalam bahasa

<sup>56</sup> Visi Pusat PVTTP, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, <http://ppvt.setjen.pertanian.go.id/ppvtp/statis-14pengantarkepalapusat.html>, diakses 19 Maret 2015

<sup>57</sup> Misi Pusat PVTTP, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, <http://ppvt.setjen.pertanian.go.id/ppvtp/statis-14pengantarkepalapusat.html>, diakses 19 Maret 2015



Indonesia Kemiripan atau persamaan diartikan sebagai 1. Perihal mempersamakan (tingginya, tingkatannya, dsb): Perlu diperjuangkan terus – hak bagi semua orang;

2 perbandingan; perumpamaan; ibarat; dl pribahasa tepat benar; 3 keadaan yang sama atau yang serupa dengan yang lain; persesuaian.<sup>59</sup> Kata Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji dan ekspresi karakteristik genotipe dan/atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.<sup>60</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Varietas diartikan sebagai perubahan rupa yang menurun sedangkan Tanaman diartikan segala yang hidup yang ditandai akar, batang, daun, dsb.<sup>61</sup>

Jika ditafsirkan secara *a contrario* atau penafsiran melalui pengingkaran makna yang sebenarnya untuk mendapatkan jawaban atas suatu peristiwa hukum kongkrit, Dalam pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman suatu varietas dikatakan mirip jika pada saat permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman, bahan perbanyak atau hasil panen dari varietas tersebut sudah pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi lebih dari setahun atau sudah diperdagangkan diluar negeri lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman

<sup>58</sup> Oxford Learner's Pocket Dictionary, Oxford University Press, New York, 2008, hlm.149

<sup>59</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Perlindungan, Kamus Besar Bahasa Indonesia *Versi Online/ daring( dalam jaringan*, [http:// kbbi.web.id/lindung](http://kbbi.web.id/lindung), diakses 16 Maret 2015

<sup>60</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

<sup>61</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Varietas dan Tanaman, Kamus Besar Bahasa Indonesia *Versi Online/ daring( dalam jaringan*, <http://kbbi.web.id/lindung>, diakses 16 Maret 2015



tahunan. Sementara penafsiran secara a contrario suatu varietas dikatakan mirip berdasarkan pasal 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman jika varietas tersebut tidak dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman.











### BAB III

#### Metode Penelitian

Hukum bisa diartikan sebagai suatu gejala masyarakat (*sosial feir*) yang memiliki segi ganda, yaitu kaidah atau norma dan perilaku (yang ajeg atau unik/khas).<sup>1</sup> Tetapi dilihat dari sisi keilmuan, hukum dapat diartikan sebagai objek penyelidikan dan penelitian berbagai disiplin keilmuan sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa hukum merupakan ilmu bersama (*rechts is mede wetenscap*).<sup>2</sup> Penelitian hukum merupakan salah satu cara untuk menemukan hukum, menurut Morris L. Cohen

*“..Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society, it involves locating both the rules which are enforced by the states and comentaries which explain or analyze these rule..”*<sup>3</sup>

Pernyataan diatas bila diterjemahkan Penelitian hukum adalah sebuah proses menemukan hukum yang mengatur aktivitas pergaulan manusia, yang melibatkan aturan yang diberlakukan oleh negara dan komentar yang menjelaskan atau menganalisis aturam ini.

Penelitian hukum secara sederhana menurut Soemerto terbagi atas dua sebagai berikut:

<sup>1</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.74

<sup>2</sup> Jhonny Ibrahim, *“Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”*, Bayu Publishing, Malang, 2005, hlm.33

<sup>3</sup> Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.29.



“Penelitian hukum bisa dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis, Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan, sementara penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian yang melibatkan data primer”.<sup>4</sup>

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan sebuah metode untuk memecahkan semua masalah dalam penelitian tersebut, metode sendiri diartikan sebagai cara yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan langkah-langkah yang sistematis.<sup>5</sup> Sementara penelitian diartikan sebagai suatu sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara konsisten, sistematis dan metodologis.<sup>6</sup> Dari uraian diatas Metode Penelitian diartikan sebagai cara seorang ilmuwan, dosen, mahasiswa atau akademisi lainnya untuk memahami, menganalisa dan mempelajari gejala dan permasalahan yang terkait dengan bidangnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat dibedakan menjadi dua yang pertama disebut dengan penelitian hukum secara *socio-legal* dan penelitian hukum normatif, seperti yang diuraikan oleh Soerjono Soemitro sebagai berikut:

Penelitian hukum bisa dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis (empiris). Penelitian hukum normatif dilakukan

<sup>4</sup> Renny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, hlm.34.

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.46.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1.



cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris menitik beratkan pada data-data primer.<sup>7</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan penelitian normatif, karena dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama dan pokok untuk menganalisis permasalahan dalam perumusan masalah skripsi ini. Penggunaan penelitian Yuridis Normatif di dasarkan atas aspek yuridis penelitian ini yang mencoba mengkaji hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman terkait dengan hubungan syarat baru dan unik dalam pemberian hak Perlindungan Varietas Tanaman dengan adanya kemiripan varietas tanaman oleh beberapa produsen benih di Indonesia.

Akan diadakan wawancara kepada beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan kemiripan dan persamaan varietas tanaman oleh beberapa produsen benih juga akan dilakukan oleh penulis untuk mendukung pengumpulan data-data dalam penulisan skripsi ini.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan yang pertama penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian yang dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan atau terkait dengan isu hukum

<sup>7</sup> Saiban Utsman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.1



yang sedang dihadapi atau ditangani. Dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Kedua penulis akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berakut dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum tersebut. Ini disebabkan karena terkadang suatu peraturan tidak bisa berkembang secara bersama dan beriringan dengan kemajuan teknologi sehingga dibutuhkan terobosan-terobosan untuk menunjang ketertinggalan dari peraturan-peraturan tersebut. Dalam penelitian penulis, pendekatan konseptual dipilih untuk mencari tahu hakekat dari makna kemiripan varietas tanaman oleh beberapa produsen benih.

### C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan, data yang digunakan dalam penelitian ini:

#### 1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang terbagi atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia,<sup>8</sup> yang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

<sup>8</sup> Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Surabaya, 2005, hlm. 295.



- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- d. Undang-Undang Nomor 15 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty On plant Genetic Resources For Food And Agricultur* Tahun 2001 tentang Merek.

2. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari:
  - a. Buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh;
  - b. Pendapat sarjana hukum;
  - c. Jurnal-jurnal hukum;
  - d. Yurisprudensi.
  - e. Traktat atau perjanjian luar negeri yang terkait dengan pokok permasalahan
3. Bahan hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier.<sup>9</sup>
  - a. Kamus Hukum;
  - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - c. Enseklopedia.

#### **D. Teknik Pemperoleh Bahan Hukum**

Cara atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai syarat baru dan unik untuk memperoleh hak Perlindungan

<sup>9</sup> Ibid, hlm 259.



Varietas Tanaman terkait dengan masalah kemiripan varietas tanaman oleh beberapa produsen benih.

Bahan hukum sekunder serta tersier didapat dari studi literatur di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, beberapa jurnal hukum dan surat kabar yang terkait dengan pokok bahasan serta artikel yang diunduh dari internet.

### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Cara analisis bahan hukum dilakukan dengan menghubungkan dan menguraikan bahan hukum yang telah ada kemudian dituangkan kedalam penulisan yang sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan terkait hubungan antara syarat baru dan unik dengan adanya kasus kemiripan varietas tanaman oleh beberapa pihak yang memiliki hak PVT yang berbeda.

Kemudian bahan hukum yang ada itu dianalisis dengan cara deduktif ataupun induktif agar dapat bisa ditemukan jawaban atas hubungan syarat baru dan unik dengan kasus kemiripan varietas tanaman yang sama oleh beberapa pihak yang memiliki hak PVT berbeda, supaya dapat didapatkan sebuah solusi berupa upaya upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya kasus kemiripan varietas oleh beberapa pihak dengan hak PVT yang berbeda.

Pada penulisan skripsi ini analisis hukum dilakukan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:



1. Tahap Identifikasi, pada tahap ini yang dilakukan adalah menginventarisasi bahan–bahan hukum yang terkait dengan syarat syarat untuk memperoleh hak Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Tahap Diskripsi, pada tahap ini yang dilakukan adalah menganalisa bahan hukum yang ada terkait dengan hubungan syarat baru dan unik dengan adanya kemiripan varietas tanaman oleh beberapa pihak dengan hak PVT yang berbeda.
3. Tahap analisis fungsional, pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari beberapa tahap sebelumnya sudah dilakukan sehingga bisa ditemukan jawaban dan solusi untuk mengatasi masalah kemiripan varietas oleh beberapa produsen benih yang ada di Indonesia sehingga dapat memberikan kepastian hukum secara maksimal kepada para pemulia tanaman yang sebenarnya.

## **F. Definisi Konseptual**

### **1. Varietas Tanaman**

selanjutnya disebut Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji dan ekspresi karakteristik genotipe dan/atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan

### **2. Syarat Baru dalam pemberian hak PVT**

Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah



diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau diperdagangkan diluar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan

### 3. Syarat Unik dalam pemberian hak PVT

Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT

### 4. Perlindungan Hukum

Merupakan instrumen hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang diciptakan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan hukum seseorang. Dalam hal ini untuk melindungi kepentingan hukum pemulia tanaman yang menemukan pertama kali varietas tanaman tertentu di Indonesia.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Bentuk Kriteria Syarat Baru dan Unik Dalam Pengujian Varietas Untuk Memperoleh Hak Perlindungan Varietas Tanaman**

Untuk melindungi kepentingan pemulia tanaman yang telah menemukan dan mengupayakan pembentukan suatu varietas tanaman baru yang bermanfaat bagi banyak masyarakat khususnya bagi kalangan petani, kiranya dibutuhkan penghargaan serta imbalan pengembalian yang layak dan sesuai untuk para pemulia atas dedikasinya di bidang pertanian dengan dasar ini pemerintah melalui badan legislatifnya sudah membentuk beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Perlindungan Varietas Tanaman. Namun terkadang suatu peraturan dan undang-undang harus perpacu atau berlari mengikuti dan menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi agar bisa relevan dan sesuai dengan keadaan atau situasi saat ini.

Hal seperti diatas sebenarnya sama dengan apa yang terjadi pada setiap peraturan dan undang-undang yang menyakut mengenai Perlindungan Varietas Tanaman, mulai berkembangnya teknologi pertanian mengakibatkan banyak terbentuk variasi tanaman baru baik yang dikembangbiakan secara alami atau melalui teknologi transgenik atau teknik rekayasa genetik. Terkait dengan batasan konsep baru dan unik dalam syarat pemberian Hak PVT atas suatu varietas baru yang merupakan aspek yang paling utama dalam penentuan pemberian Hak PVT



dengan kata lain syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi bilamana pemulia tanaman ingin varietas tanaman yang dia temukan dilindungi secara hukum (menjadi miliknya secara hukum). Dalam menentukan kriteria baru dan unik sebenarnya sudah terjadi pertentangan di beberapa tahun yang lalu oleh beberapa pihak, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya dimungkinkan lagi terjadi perubahan makna dari kriteria baru dan unik dalam pengujian varietas baru hal inilah yang akan penulis bahas dalam bab ini.

Diperlukan adanya kejelasan konsep baru dan unik agar tidak terjadi penafsiran ganda, disharmonisasi dan perbedaan penerapan hukum mengenai kriteria makna baru dan unik dalam pemberian hak Perlindungan Varietas Tanaman atas varietas tanaman baru.

Untuk mencari tahu serta menganalisa konsep baru dan unik penulis mencoba mengalinya melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh UPOV yang merupakan aturan hukum Internasional yang sudah terlebih dahulu mengatur mengenai Perlindungan Varietas Tanaman dan syarat-syarat untuk memperoleh Hak Perlindungan Varietas Tanaman. Meskipun sampai saat ini Indonesia belum menjadi anggota dari UPOV namun materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman banyak yang mengadopsi Konvensi UPOV.

### **A.1.Syarat-syarat umum untuk memperoleh Hak Perlindungan Varietas Tanaman Berdasarkan Konvensi UPOV**

Terdapat beberapa ketentuan agar suatu varietas bisa diberi perlindungan, salah satu syarat yang pertama harus dipenuhi itu adalah syarat yang





mengharuskan varietas tersebut sudah didefinisikan, baru varietas tersebut bisa diperiksa untuk pemenuhan kriteria DUS (Distinctness, Uniformity, Stability)

yang merupakan syarat-syarat untuk memperoleh Hak Perlindungan Varietas Tanaman. Semua peraturan dalam Konvensi UPOV 1991 sudah menentukan bahwa varietas didefinisikan berdasarkan karakteristik dan ciri-ciri khusus, karena hal tersebut dipakai sebagai dasar varietas dalam pengujian DUS.<sup>1</sup>

Pada Konvensi UPOV 1991 pasal 1 (IV) dijelaskan mengenai pengertian varietas, seperti berikut:<sup>2</sup>

*“Variety” means a plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank, which grouping, irrespective of whether the conditions for the grant of a breeder’s right are fully met, can be :*

- *Defined by the the expression of the characteristics resulting from a given genotype or combination of genotypes;*
- *Distinguished from any other plant grouping by the expresison of at least one of the said characteristics and;*
- *Considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged.*

pasal tersebut bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia bisa diartikan seperti berikut:

<sup>1</sup> UPOV, General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability and the Development of the Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants, TGP/1, Di Publikasikan 19 April 2002.

<sup>2</sup> Pasal 1 (IV) Konvensi Upov 1991



“Varietas” diartikan sekelompok tanaman dalam tingkatan takson botani tertentu yang diketahui, yang dikelompokkan, terlepas dari apakah keadaan untuk pemberian hak PVT. Kondisi atau keadaan agar varietas bisa diberi hak PVT harus bisa :

- Didefinisikan oleh ekspresi dari karakteristik yang dihasilkan dari genotipe tertentu atau kombinasi beberapa genotipe;
- Debedakan dari setiap tanaman lain dalam kelompoknya setidaknya oleh satu ciri ekspresi karakteristik;
- Dianggap sebagai satu kesatuan yang berkaitan tetap sesuai setelah disebarkan/ ditanaman beberapa kali tidak berubah.

Inti dari pasal tersebut yang ingin disampaikan adalah varietas diartikan sebagai sekelompok tanaman yang dapat didefinisikan oleh ekspresi dari karakteristik yang dihasilkan dari genotipe tertentu atau kombinasi beberapa genotipe, dapat dibedakan dari tanaman lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum setidaknya oleh satu ciri-ciri khas atau karakteristik tertentu dan tanaman tersebut merupakan satu kesatuan dalam arti semua tanaman mempunyai bentuk yang sama (seragam) serta tidak mengalami perubahan setelah ditanaman beberapa kali.

Varietas seperti yang dijelaskan diatas agar bisa mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman selanjutnya harus bisa memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 5 Konvensi UPOV 1991 yang berbunyi seperti berikut:<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Pasal 5 Konvensi UPOV 1991



(1) [Criteria to be satisfied] The breeder's right shall be granted where the variety is

- i. New,
- ii. Distinct,
- iii. Uniform and
- iv. Stable.

(2) [Other conditions] The grant of the breeder's rights shall not be subject to any further or different condition, provided that the variety is designated by a denomination in accordance with the provisions of Article 20, that the applicant complies with the formalities provided for by the law of the contracting Party with whose authority the application has been filed and that he pays the required fees.

Pasal 5 tersebut bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti berikut:

(1) [Kriteria yang harus dipenuhi] Hak Pemulia (Hak PVT) diberikan dimana varietas tersebut:

- i. Baru,
- ii. Berbeda,
- iii. Seragam dan
- iv. Stabil.

(2) [Kondisi lain] Pemberian Hak Pemulia (Hak PVT) tidak dikenakan setiap kondisi lebih lanjut atau berbeda, asalkan varietas menunjukkan denominasi sesuai dengan ketentuan pasal 20, bahwa permohonan sesuai dengan formalitas hukum dari pihak yang berwenang, permohonan telah diajukan dan membayar biaya yang diperlukan.



Dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa hanya varietas yang baru, berbeda, seragam dan stabil yang bisa diberi Hak PVT namun terdapat kemungkinan lain untuk varietas bisa diberi Hak PVT kemungkinan tersebut tentunya harus didasarkan atas suatu keadaan tertentu yang bisa dipergunakan secara meyakinkan bahawa varietas tersebut layak untuk mendapatkan Hak PVT.

Dalam Konvensi UPOV sendiri dijelaskan lebih dalam lagi mengenai makna atau pengertian dari ketentuan pasal 6 ayat 1 tersebut, untuk makna baru atau didalam pasal 6 Konvensi UPOV disebut “Novelty” dijelaskan seperti berikut:<sup>4</sup>

*Article 6 Novelty*

*(1) [Criteria] The variety shall be deemed to be a new if, at the date of filing of the application for a breeder's rights, propagating or harvested material of the variety has not been sold otherwise disposed of to others, by or with the consent of the breeder, for purposes of exploitation of the variety*

Pasal tersebut bila diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

*Pasal 6 Novelty*

*(1) [Kriteria] Suatu varietas dianggap baru jika pada saat tanggal pengajuan permohonan Hak Pemulia, bahan perbanyakan atau hasil panen belum dijual atau diberitahukan kepada orang lain, oleh atau dengan persetujuan pemulia untuk tujuan eksploitasi varietas.*

<sup>4</sup> Pasal 6 ayat (1) Konvensi UPOV 1991



Pasal 6 ayat (1) mengisyaratkan bahwa varietas yang baru adalah varietas yang benar-benar belum diketahui oleh masyarakat umum, dan kriteria belum diketahui oleh masyarakat umum ini cukup luas, tidak hanya sebatas benih varietas diperjualbelikan saja, bisa juga termasuk mengikutkan varietas tersebut dalam seminar dan festival atau jambore varietas, kegiatan tersebut biasanya dimaksudkan untuk memperkenalkan produk benih baru suatu perusahaan atau untuk sekedar melihat reaksi para petani dan distributor benih dalam menyingkapi benih baru mereka jika dirasa respon masyarakat positif baru benih tersebut didaftarkan secara hukum melalui Permohonan Hak PVT, namun kegiatan yang dilakukan perusahaan benih seperti yang saya ilustrasikan diatas juga dikategorikan dalam kegiatan untuk tujuan eksploitasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

Untuk makna “*Distinctness*” atau dalam bahasa Indonesia diartikan berbeda dijelaskan dalam pasal 7 Konvensi UPOV 1991 yang berbunyi seperti berikut:<sup>5</sup>

*The Variety shall be deemed to be distinct if it is clearly distinguishable from any other variety whose existence is a matter of common knowledge at the time of the filing of the application for the granting of a breeder's right or for the entering of another variety in an official register of varieties, in any country, shall be deemed to render that other variety a matter of common knowledge from the date of the application, provided that the application leads to the granting of a breeder's right or to the entering of the said other variety in the official register of varieties, as the case may be.*

<sup>5</sup> Pasal 7 Konvensi UPOV 1991



Pasal tersebut bila diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Suatu varietas dianggap memenuhi unsur “*Distinctness*” jika dapat dibedakan secara jelas dari varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat pengajuan permohonan. Secara khusus pengajuan permohonan *Breeder Right* (Hak PVT) atau masuknya varietas lain dalam daftar resmi varietas dinegara manapun akan membuat varietas tersebut dikategorikan varietas yang diketahui secara umum pada saat masuknya permohonan, asalkan permohonan tersebut mengarah pada pemberian *Breeder Right* (Hak PVT) atau masunya varietas lain dapat dimasukan dalam daftar resmi varietas, dalam beberapa kasus hal tersebut mungkin saja terjadi.

Makna syarat baru seperti yang tersebut dalam pasal 7 diatas memiliki beberapa poin penting pertama varietas dikatakan telah memenuhi unsur *Distinctness* bilamana varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum (dalam hal ini varietas yang digunakan sebagai pembanding adalah varietas sejenis dan yang paling mirip), poin yang kedua adalah suatu varietas yang dimohonkan walaupun belum diberikan/diterbitkan Hak PVT atas varietas tersebut, namun varietas tersebut sudah dikategorikan/dianggap diketahui secara umum, dari poin kedua ini terlihat bahwa dalam pendaftaran *Breeder Right* UPOV menganut sistem *first to file* yang merupakan sistem pendaftaran atas suatu invensi atau ciptaan yang didasarkan atas siapa yang pertama kali mendaftarkan invensi atau ciptaanya baik



pribadi atau badan hukum dianggap sebagai penemu atau pemilik atas investasi atau ciptaan tersebut.<sup>6</sup>

Selanjutnya dijelaskan juga makna *Uniformity* atau keseragaman yang termuat dalam pasal 8 Konvensi UPOV 1991 seperti berikut ini:

*The variety shall be deemed to be uniform if, subject to the variation that may be expected from the particular features of its propagation, it is sufficiently uniform in its relevant characteristics.*<sup>7</sup>

Pasal tersebut bila diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi seperti berikut:

Suatu varietas dianggap seragam jika, harus memenuhi variasi atau perbedaan yang dapat diharapkan dari fitur propagasi tertentu, varietas tersebut cukup seragam dalam karakteristik yang relevan.

Dari pasal 8 Konvensi UPOV 1991 tersebut bisa diartikan bahwa keseragaman digambarkan pada suatu varietas yang mempunyai karakteristik atau sifat sifat esensial yang sama walaupun terdapat perbedaan dalam cara penanaman atau penentuan cara propagasi pada varietas tersebut.

Makna syarat pemberian Hak Pemulia /Hak PVT yang terakhir yaitu syarat *Stability* atau kestabilan dijelaskan dalam pasal 9 Konvensi UPOV 1991, yang tertulis seperti berikut ini:

<sup>6</sup> HukumOnline.com, Perlindungan merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5892/perlindungan-merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-di-indonesia>, diakses pada tanggal 29 Juni 2015 pukul 13:14 WIB

<sup>7</sup> Pasal 8 Konvensi UPOV 1991



*The variety shall be deemed to be stable if its relevant characteristics remain unchanged after repeated propagation or, in the case of a particular cycle of propagation, at the end of each such cycle.*<sup>8</sup>

Pasal tersebut jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi seperti berikut:

Varietas yang dianggap stabil jika karakteristik yang relevan tetap tidak berubah setelah berulang kali propagasi atau dalam kasus siklus propagasi tertentu, pada akhir setiap siklus tersebut.

Dari pasal 9 Konvensi UPOV mengisyaratkan bahwa varietas dianggap stabil jika karakteristik khusus yang digunakan sebagai patokan pembeda tidak berubah setelah berulang kali dilakukan penanaman atau tetap tidak berubah walaupun menggunakan siklus propagasi yang berbeda-beda.

#### **A.1.1 Analisis Pengujian Varietas Dalam menentukan *Distinctness, Uniformity* dan *Stability* atau Uji “DUS” Berdasarkan Konvensi UPOV 1991**

Untuk menentukan suatu varietas baru yang diciptakan seorang pemulia sudah memenuhi kriteria yang disyaratkan untuk memperoleh Hak Pemulia/ Hak PVT maka perlu dilakukan pengujian atas varietas yang bersangkutan pengujian yang dimaksud disini adalah Uji “DUS” untuk menentukan tingkat perbedaan dari varietas yang akan diuji dengan varietas lain yang sudah menjadi *public knowledge* (pengetahuan umum) atau oleh varietas lain yang sudah didaftarkan dan diberi Hak Pemulia atau Hak PVT, untuk mengetahui tingkat keseragaman

<sup>8</sup> Pasal 9 Konvensi UPOV 1991



dari varietas atau *Uniformity* dan untuk menentukan tingkat kestabilan dari varietas (*Stability*).

Sudah dijelaskan dalam pasal 5 sampai pasal 9 mengenai kriteria atau syarat-syarat apa saja yang dipergunakan untuk pengajuan Hak PVT, Selanjutnya untuk mengetahui apa yang dipergunakan untuk pengujian varietas atas permohonan Hak PVT baru tersebut. Pengujian atau pemeriksaan varietas didasarkan atas pasal 12 Konvensi UPOV 1991 yang tertulis seperti berikut:

*Article 12 Examination of the Application*

*Any decision to grant a breeder's right shall require an examination for compliance with the conditions under article 5 to article 9. In the course of the examination, the authority may grow the variety or carry out other necessary tests, cause the growing of the variety or the carrying out of other necessary tests, or take into account the results of growing tests or other trials which have already been carried out. For the purposes of examination, the authority may require the breeder to furnish all the necessary information, documents or material.*<sup>9</sup>

Pasal tersebut bila diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

**Pasal 12 Pemeriksaan Permohonan**

Setiap Keputusan untuk memberikan *Breeder's Rights* (Hak PVT) akan memerlukan pemeriksaan untuk memenuhi kondisi pasal 5 sampai pasal 9. Dalam perjalanan pemeriksaan, kewenangan dalam melakukan pengujian dapat berkembang atau dapat dilakukan pengujian lain bila diperlukan, karena

<sup>9</sup> Pasal 12 Konvensi UPOV 1991





perkembangan varietas atau melakukan pengujian lain yang diperlukan atau memperhatikan hasil uji pertumbuhan atau percobaan lain yang telah dilakukan untuk keperluan pemeriksaan, pihak berwenang mungkin memerlukan kerjasama dengan pemulia untuk memberikan informasi, dokumen atau materi yang diperlukan.

Dalam pemeriksaan atau uji “DUS” terdapat persyaratan bahan atau materi varietas yang dipergunakan untuk uji “DUS”, Materi atau bahan-bahan tersebut meliputi:<sup>10</sup>

A. Bahan representatif tanaman

Materi yang akan diserahkan untuk pemeriksaan “DUS” harus benar-benar mewakili calon varietas yang dimohonkan. Dalam kasus varietas dengan siklus propagasi tertentu, seperti hibrida dan varietas sintetis. Ini berarti bahwa bahan yang diuji harus mencakup tahap akhir dalam siklus perbanyakan

B. Materi atau bahan dalam kategori sehat secara umum yang disampaikan

Bahan tanaman yang diserahkan untuk pemeriksaan harus sehat, tidak terpengaruh atau kuat oleh hama atau penyakit dan terkait dengan benih harus mempunyai tingkat perkecambahan yang cukup untuk pelaksanaan pemeriksaan yang memuaskan.

C. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ekspresi karakteristik dari varietas

Ekspresi karakteristik dari beberapa varietas dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penyakit dan hama, pengobatan kimia (zat

<sup>10</sup> UPOV, General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability and the Development of the Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants, TGP/1, Di Publikasikan 19 April 2002. Hlm. 7



penghambat pertumbuhan contohnya pestisida), pengaruh dari kultur jaringan, batang bawah yang berbeda, batang atas yang diambil dari fase pertumbuhan yang berbeda pohon. Dalam contoh beberapa kasus pengaruh lainnya seperti ketahanan terhadap penyakit, reaksi terhadap faktor-faktor tertentu sengaja digunakan sebagai karakteristik pemeriksaan “DUS”, oleh karena itu tergantung pada keadaan dan kondisi/sifat dari varietas yang akan diuji. Lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan atau uji “DUS” harus memastikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Semua varietas yang diuji bebas dari faktor-faktor tersebut;
- (2) Bahwa semua varietas yang termasuk dalam uji “DUS”, termasuk dalam varietas yang masuk dalam *public knowledge* (dalam hal ini yang dimaksud adalah varietas pembandingnya) dalam pengujian tunduk pada faktor dan perlakuan yang sama;
- (3) Dalam kasus dimana pemeriksaan yang memuaskan masih bisa dilakukan, karakteristik efektif dikecualikan dari pemeriksaan “DUS”, kecuali ekspresi sebenarnya dari karakteristik genotipe tanaman dapat ditentukan, meskipun ada faktor-faktor yang disebutkan diatas.<sup>11</sup>

#### **A.1.1.1 Kerja sama dalam pengujian “DUS”**

Untuk mempersingkat waktu dan mempermudah proses pemeriksaan, diperlukan kerjasama dalam pemeriksaan atau pengujian “DUS”, hal ini karena terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang membuat varietas hanya dapat ditanam dan tumbuh secara optimal di daerah tertentu saja selain itu keterbatasan varietas pembanding untuk menentukan tingkat keunikan oleh sebuah lembaga

<sup>11</sup> UPOV TGP/1, Factors That May Affect the Expression of the Characteristics of a Variety, Di Publikasikan 19 April 2002. hlm. 7



yang berwenang melakukan pengujian, karena itu diperlukan kerjasama dalam pengujian “DUS”. Dalam kerjasama pengujian dibedakan menjadi dua antara lain:<sup>12</sup>

- a. Kerjasama antar lembaga yang berwenang dalam melakukan pengujian

Kerjasama dengan lembaga penguji lain yang berwenang dari anggota perhimpunan (dalam hal ini UPOV) dapat mempersingkat waktu pengujian, biaya dan jumlah pemeriksa yang terlibat dalam pengujian “DUS” (dapat memaksimalkan koleksi varietas pembandingan yang ada).

Rincian peraturan yang mengatur kerjasama antar lembaga yang berwenang melakukan pengujian terdapat dalam TGP/5 tentang *Experience and Cooperation in DUS Testing*

Bentuk akhir dari kerjasama Internasional ini adalah sistem pengujian terpusat secara regional atau global dimana seluruh pemeriksaan dilakukan oleh satu lembaga yang berwenang atas nama seluruh anggota perhimpunan yang lain. Pemeriksaan terlepas dari varietas dan pemulia yang bersangkutan. Kerjasama dalam pemeriksaan ini bisa dilakukan dengan syarat jika lingkungan baik alami atau tidak, cocok dan sesuai untuk pemeriksaan semua varietas yang relevan

- b. Kerjasama dengan pemulia dalam pengujian “DUS”

Dibeberapa negara pengujian varietas dikelola oleh lembaga resmi yang berwenang, walaupun pemulia bisa ikut serta dalam pengujian tes tumbuh dalam berbagai tingkatan berdasarkan kondisi dan keadaan tertentu.

<sup>12</sup> UPOV, General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability and the Development of the Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants, TGP/1, Di Publikasikan 19 April 2002, hlm. 8





UPOV sebenarnya selalu menyarankan dan mempromosikan kerjasama pengujian antara pemulia dengan lembaga penguji “DUS” yang berwenang, bahkan jika tenaga pemeriksa varietas menggunakan sistem yang ketat dalam pengujian yang dilakukan pemerintah. Beberapa anggota UPOV ada yang memiliki sebuah sistem pengujian dimana pemulia diminta melakukan pengujian pemulia diminta untuk melakukan pengujian varietas secara keseluruhan sebagai syarat untuk uji “DUS”. Secara langsung mereka diminta untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian “DUS” atas varietasnya dan membuat laporan (diskripsi varietas) sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur. Keputusan terpenuhinya syarat syarat uji “DUS” mungkin didasarkan pada laporan tes (diskripsi varietas) yang dibuat oleh pemulia meskipun lembaga pemeriksa yang berwenang bisa memverifikasi hasil laporan pemulia, misalnya dengan pemeriksaan independen (tersendiri) dan publikasi diskripsi varietas. Namun dalam melakukan kerjasama pemeriksaan dengan pemulia terdapat beberapa keadaan atau kondisi untuk pemeriksaan varietas atas dasar pengujian “DUS”, peraturan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam TGP/6 tentang *Arrangement for DUS Testin*.

#### **A.1.1.2 Karakteristik varietas yang dipakai dalam pengujian “DUS”**

Seperti penjelasan diawal tadi, bahwa suatu varietas bisa diberi perlindungan jika varietas tersebut terlebih dahulu bisa didefinisikan secara jelas, dasar pendefinisian suatu varietas adalah karakteristik atau ciri-ciri khusus dari varietas yang bersangkutan.



Dalam sebuah pengujian “DUS” tidak semua karakteristik varietas dapat dipakai dalam pengujian, suatu karakteristik varietas harus memenuhi syarat tertentu sebelum dipakai dalam pengujian “DUS” atau untuk mendiskripsikan varietas. Syarat-syarat dari karakteristik yang dimaksud disini adalah ekspresi varietas yang mencakup:<sup>13</sup>

- a) Hasil genotipe tertentu atau kombinasi beberapa genotipe (syarat ini didasarkan pasal 1 (IV) Konvensi UPOV 1991, merupakan dasar persyaratan yang digunakan sebagai acuan penentuan atau pemilihan karakteristik)
- b) Cukup konsisten dan tetap sama dan berlanjut dalam lingkungan tertentu
- c) Membangun variasi yang cukup antara varietas sehingga bisa membangun keunikan
- d) Mampu didefinisikan dengan tepat dan diakui (syarat ini didasarkan pasal 6 Konvensi UPOV 1961/1972 dan 1978, namun merupakan acuan disetiap keadaan)
- e) Memenuhi persyaratan keseragaman yang harus dipenuhi
- f) Memungkinkan persyaratan stabilitas yang harus dipenuhi, artinya menghasilkan hasil yang konsisten dan berulang (tetap) setelah propagasi atau penanaman beberapa kali dilihat setelah akhir setiap siklus perbanyakan.

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan disini adalah tidak ada persyaratan untuk menentukan karakteristik yang memiliki nilai komersial instrik atau jasa, Namun jika karakteristik yang mempunyai nilai komersial atau jasa

<sup>13</sup> ibid, hlm. 9



memenuhi semua kriteria untuk dimasukan mungkin dianggap dengan cara seperti biasa.

Agar suatu varietas yang akan diuji dan diskripsikan bisa diterima, berbagai ekspresi setiap karakteristik dalam panduan pengujian dibagi menjadi beberapa keadaan untuk tujuan diskripsi dan disetiap keadaan atau kondisi diberi nomor / catatan (tanda). Pembagian keadaan ekspresi dipengaruhi oleh jenis ekspresi karakteristik. Untuk mengoptimalkan penggunaan dari karakteristik dalam pengujian “DUS”, penting untuk memahami cara-cara yang berbeda dimana karakteristik bisa dinyatakan. Berikut ini cara-cara mengidentifikasi berbagai jenis ekspresi dan dianggap penerapannya dalam pengujian “DUS”, antara lain:<sup>14</sup>

#### **A.1.1.2.1 Karakteristik kualitatif**

Karakteristik yang dinyatakan dalam keadaan diskontinyu [misalnya jenis kelamin tanaman: diocius betina (1), diocius laki-laki (2), berumah satu berkelamin tunggal (3), hemaprodit berumah satu (4)]. Keadaan ini cukup jelas dan mempunyai makna sendiri-sendiri. Semua keadaan diperlukan untuk menggambarkan berbagai karakteristik dan setiap bentuk ekspresi dapat dijelaskan oleh suatu keadaan, urutan keadaan tidak penting, perlu diingat bahwa karakteristik yang dimaksud tidak dipengaruhi oleh lingkungan.

#### **A.1.1.2.2 Karakteristik kuantitatif**

Karakteristik yang dinyatakan melalui ekspresi yang mencakup berbagai variasi dari suatu keadaan atau pengaruh luar yang lain, ekspresi itu dapat direkam atau dicatat pada suatu ukuran, terus menerus atau berlainan dengan skala linier.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 10



Kisaran ekspresi dibagi menjadi beberapa keadaan untuk tujuan diskripsi varietas

[misalnya panjang batang: sangat pendek (1), pendek (3), Menengah (5), Panjang (7), sangat panjang (9)]

Pembagian divisi tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan kemudahan dalam distribusi seluruh skala. “*Test Guidelines*” tidak menentukan perbedaan yang dibutuhkan untuk keunikan. Keadaan ekspresi bagaimanapun harus bermakna untuk penilaian “DUS”.

#### **A.1.1.2.3 Karakteristik Pseudo-Kualitatif**

Pengujian menggunakan karakteristik ini terbagi menjadi beberapa ekspresi setidaknya sebagian terus menerus, tetapi bervariasi dalam lebih dari satu ukuran [misalnya bentuk: bulat (1), bulat panjang (2), milingkar (3), obovate (4)] dan tidak dapat dijelaskan secara memadai dengan hanya mengidentifikasi dua ujung kisaran linier /dibandingkan secara langsung.

Setelah penentuan-penentuan karakteristik yang dipakai untuk pengujian “DUS”, dilakukan pengamatan atas varietas tersebut, Dalam melakukan pengamatan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan faktor-faktor seperti organisme hidup (contohnya karakteristik tahan penyakit) atau bahan kimia (misalnya karakteristik tahan herbisida), dapat digunakan asalkan memenuhi kriteria yang telah ditentukan selain itu karena potensi untuk variasi dalam faktor-faktor seperti itu penting dalam penentuan karakteristik untuk bisa didefinisikan dengan baik dan diperlukan metode yang tepat dalam membentuk serta memastikan konsistensi dalam pemeriksaan, selain itu perlu diperhatikan juga karakteristik khusus lain yaitu berupa kandungan kimia dalam suatu karakteristik asalkan hal tersebut memenuhi kriteria yang ditentukan, selanjutnya karakteristik



khusus yang dimungkinkan dipakai adalah adanya gabungan karakteristik yaitu berupa kombinasi sederhana dari sejumlah kecil karakteristik, dengan syarat kombinasi secara biologis yang bermakna karakteristik karakteristik dapat dinilai dengan terpisah, sehingga dapat digabungkan.

#### **A.1.1.3 Pemeriksaan Keunikan**

Berdasarkan Konvensi UPOV 1991 Pasal 7, untuk memenuhi syarat keunikan, varietas harus bisa jelas dibedakan dengan varietas lain yang keberadaannya sudah menjadi pengetahuan umum.

Aspek kunci untuk menentukan keunikan suatu varietas adalah terkait varietas pembanding yang dalam hal ini menjadi varietas pengetahuan umum.

Pertimbangan sebuah lembaga penguji dalam menentukan varietas yang diketahui menjadi pengetahuan umum merupakan faktor penting dalam menentukan kriteria titik keunikan suatu varietas baru, yang termasuk dalam varietas yang menjadi pengetahuan umum sendiri meliputi semua jenis varietas yang sudah diedarkan dipublikasikan dan/atau dijual serta varietas yang sudah didaftarkan pada lembaga yang berwenang.<sup>15</sup> Pengaturan terkait dengan varietas yang menjadi pengetahuan umum lebih lanjut diatur dalam TGP/3 “*Varieties of Common Knowledge*”

Secara garis besar terdapat aspek-aspek tertentu yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan varietas pengetahuan umum, antara lain:

- a) Sudah terjadi komersialisasi bahan/hasil propagasi atau bahan hasil panen dari varietas yang bersangkutan atau mempublikasikan keterangan mengenai varietas secara resmi;

<sup>15</sup> UPOV, General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability and the Development of the Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants, TGP/1, Di Publikasikan 19 April 2002, Jenewa, hlm. 13



- b) Pengajuan permohonan pemberian “*breeder right*” (Hak PVT) atau masuknya varietas tertentu dalam daftar resmi varietas dinegara manapun varietas tersebut dianggap menjadi varietas pengetahuan umum pada saat tanggal permohonan diajukan, namun dengan syarat permohonan mengarah pada pemberian Hak PVT;
- c) Materi tanaman hidup yang digunakan dapat diakses bebas oleh publik atau masyarakat.<sup>16</sup>

#### A.1.1.3.1 Kejelasan makna unik pada suatu varietas

Perbandingan varietas merupakan upaya pengujian varietas untuk memeriksa keunikan dalam hubungannya dengan semua jenis varietas yang menjadi pengetahuan umum, namun bilamana suatu varietas sudah bisa dilihat secara jelas bahwa keadaan dari ekspresi karakteristik dan benar-benar berbeda dan unik maka tidak perlu dilakukan perbandingan varietas secara sistematis dengan varietas lain yang dianggap sama/mirip.

Selain dengan cara membandingkan varietas terdapat prosedur tambahan lain untuk memenuhi unsur keunikan, misalnya dengan penerbitan diskripsi varietas, dengan dipublikasikan suatu diskripsi varietas akan mengundang masyarakat atau pemulia lain untuk melihat, bilamana ada salah satu pihak yang berkepentingan merasa ada pelanggaran hak dalam diskripsi varietas tersebut dapat langsung merespon dan memberitahu lembaga terkait yang memberi Hak PVT bahwa varietas yang digunakan dalam diskripsi varietas tersebut merupakan varietas yang secara hukum sudah dimilikinya sehingga orang lain tidak bisa menggunakannya atau mendaftarkannya lagi tanpa persetujuan dari sang pemilik

<sup>16</sup> ibid



Hak PVT terdahulu tersebut. Namun perlu diingat prosedur ini merupakan prosedur tambahan dalam hubungannya dengan prosedur lain yang memberikan pemeriksaan yang lebih efektif dan pemeriksaan keunikan secara keseluruhan.

UPOV sendiri tidak menerangkan secara langsung makna dari varietas dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang sejenis yang sudah diketahui secara umum. Namun terdapat dasar yang telah dikembangkan untuk menggunakan karakteristik yang dapat membedakan secara jelas keberadaan suatu varietas baru, misalnya varietas A dapat dianggap jelas bisa dibedakan dengan varietas yang menjadi pengetahuan umum, jika perbedaan karakteristiknya:<sup>17</sup>

a) Konsisten

Karakter yang konsisten sendiri dapat diamati/diteliti melalui penanaman satu musim tanam, namun untuk memastikan keakuratan konsistensi keunikan biasanya dilakukan pengamatan pada dua musim tanam atau dilakukan penanaman di dua tempat yang berbeda pada satu musim tanam.

b) Karakter yang jelas

Untuk menentukan suatu varietas dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang sejenis yang menjadi pengetahuan umum tergantung oleh beberapa faktor serta harus mempertimbangkan keunggulan, jenis ekspresi karakteristik yaitu apakah dinyatakan dalam karakter kualitatif, karakter kuantitatif atau karakter psedo-kualitatif.

b.1. Karakteristik Kualitatif

Dalam karakter kualitatif perbedaan antara dua varietas dapat dianggap jelas apakah terdapat satu atau lebih karakteristik yang memiliki ekspresi

<sup>17</sup> UPOV TGP/1, The Criteria for Distinctness Using Characteristics, Di Publikasikan 19 April 2002, Jenewa, hlm. 14





yang jatuh ke dua keadaan yang berbeda seperti yang digambarkan dalam pedoman dasar pengujian (*Test Guidelines*).<sup>18</sup> Misalnya saya seorang pemulia tanaman jagung, saya akan mendaftarkan jagung rakitan saya ke pusat PVTTP, jagung yang akan daftarkan ini mempunyai warna buah pink atau merah muda, dalam hal ini di Indonesia atau di dunia masih belum ada varietas jagung dengan buah pink/merah muda, karena itu tanpa perlu melakukan pengukuran dan perhitungan untuk membandingkan dengan varietas yang menjadi pengetahuan umum varietas jagung saya secara kualitas sudah jelas berbeda dengan varietas jagung sejenis yang sudah menjadi pengetahuan umum.

#### b.2. Karakteristik Kuantitatif

Dalam karakteristik kuantitatif, pertimbangan mengenai keunikan diperoleh melalui metode observasi, pengamatan dan pengukuran perbandingan dengan varietas sejenis yang paling mirip.<sup>19</sup> Contohnya saya seorang pemulia varietas jagung kemudian saya mendaftarkan varietas saya ke Pusat PVTTP, varietas jagung yang rakit ini memiliki bentuk dan warna yang hampir mirip dengan varietas jagung milik PT.A namun jagung saya memiliki ukuran diameter buah 9 cm setelah 2,5 bulan penanaman sedangkan varietas jagung milik PT.A hanya memiliki diameter 5 cm setelah 2,5 bulan penanaman. Varietas jagung rakitan saya dengan varietas jagung milik PT.A memang terlihat sama baik dari segi bentuk dan warnanya tetapi setelah melalui tahap perbandingan, pengukuran dan observasi selama 2,5 bulan terdapat fakta bahwa secara jelas memang terdapat satu ekspresi karakteristik

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 15

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 15



yang bisa membedakan antara jagung varietas rakitan saya dengan milik PT.A

### b.3. Karakteristik Pseudo-Kualitatif

Untuk menentukan tingkat keunikan suatu varietas tidak cukup hanya dengan menggunakan pedoman dasar pengujian (Test Guidelines), tetapi dalam keadaan tertentu varietas dijelaskan oleh kondisi ekspresi yang sama namun bisa dikatakan berbeda, psedo-kualitatif merupakan metode pengujian keunikan yang memiliki titik yang lebih kompleks.

#### A.1.1.3.2 Penafsiran pengamatan keunikan tanpa menggunakan metode statistik

Dalam keadaan dimana sedikit variasi varietas pembanding, penentuan keunikan biasanya atas dasar penilaian visual, bukan dengan metode statistik. Sebagaimana dijelaskan pada karakteristik kualitatif, untuk menentukan perbedaan antara dua varietas dapat dianggap jelas apakah satu atau lebih karakteristik yang mempunyai ekspresi yang berbeda dalam pedoman dasar pengujian (*Test Guidelines*), sedangkan untuk karakteristik kuantitatif perbedaan di dua catatan sering merupakan perbedaan yang jelas, tetapi hal tersebut bukan standar untuk penilaian keunikan, namun tergantung pada faktor-faktor seperti tempat pengujian, tahun, variasi lingkungan atau kisaran ekspresi dalam koleksi varietas, perbedaan yang jelas mungkin lebih atau kurang dari dua catatan. Peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai ini ada dalam TGP/9 "*Examining Distinctness*"

#### A.1.1.3.3 Penafsiran pengamatan keunikan dengan metode statistik



Untuk menggambarkan dan pengukuran karakteristik dengan metode statistik dapat diterapkan, metode yang tepat harus dipilih untuk menafsirkan pengamatan.

Struktur data dan jenis skala dari sudut pandang statistik (nominal, ordinal, interval dan rasio) merupakan unsur yang penting dalam memilih metode yang tepat. Struktur data tergantung pada penilaian (gambaran penafsiran atau pengukuran rencana pengamatan tanaman tunggal), yang dipengaruhi jenis karakteristik, fitur perbanyakan dari varietas, rencana percobaan dan rencana lainnya. Para pemeriksa “DUS” harus menyadari aturan statistik dasar tertentu karena itu asumsi-asumsi pengamatan harus diverifikasi sebelum penerapan metode statistik. Beberapa metode statistik yang cukup kuat dapat digunakan namun harus hati-hati jika beberapa asumsi pengamatan tidak terpenuhi.<sup>20</sup>

#### **A.1.1.3.4 Penilaian visual karakteristik**

Penggunaan statistik-parametrik dapat digunakan ketika karakteristik visual dinilai telah dicatat pada skala yang tidak memenuhi asumsi statistik parametrik biasanya perhitungan rata-rata misalnya hanya diperbolehkan jika catatan yang diambil dalam skala bertingkat telah menunjukkan keadaan yang sama diseluruh skala. Dalam kasus prosedur non parametrik, penggunaan skala yang ditetapkan atas dasar contoh perwakilan varietas berbeda keadaan dari karakteristik yang dianjurkan.

UPOV mengizinkan setiap anggota untuk mengembangkan cara sistematis mereka untuk menentukan keunikan, berdasarkan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh UPOV.

<sup>20</sup> UPOV TGP/1, Interpretation of Observation for the Assessment of Distinctness with the Application of Statistical Methods, Di Publikasikan 19 April 2002, Jenewa, hlm. 16



#### A.1.1.4 Pemeriksaan Keseragaman

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 Konvensi UPOV 1991 bahwa suatu varietas dianggap seragam jika variasi (populasi) dari varietas setelah propagasi tetap cukup seragam dalam karakteristik yang relevan, sehingga membuat jelas karakteristik dasar yang digunakan untuk pemeriksaan keseragaman. Terkait dengan karakteristik yang relevan dari varietas mencakup setidaknya semua karakteristik yang digunakan untuk pemeriksaan “DUS” atau yang termasuk dalam diskripsi varietas yang dibuat pada tanggal pemberian perlindungan varietas itu. Konvensi UPOV mencoba mengkaitkan persyaratan keseragaman untuk varietas dengan tipe propagasi dari varietas yang bersangkutan, ini artinya keseragaman diperlukan untuk varietas yang benar-benar menyerbuk sendiri, tiap jalur anakan (F1) varietas hibrida, varietas sintesis dan varietas hibrida.<sup>21</sup>

##### A.1.1.4.1 Metode untuk pemeriksaan keseragaman

Dalam hal ini keseragaman dapat dinilai dengan mempertimbangkan keseluruhan variasi/populasi dari varietas yang bersangkutan diamati pada seluruh tanaman secara sendiri-sendiri (independen) untuk mencari tahu ada tidaknya salah satu variasi varietas yang berbeda atau menyimpang dari varietas yang sebanding/sama dalam hal ini disebut dengan istilah “*off-types*”.<sup>22</sup>

Terdapat beberapa pendekatan dalam penentuan tingkat keseragaman dan penentuan variasi varietas tanaman yang “*off-types*” antara lain:<sup>23</sup>

<sup>21</sup> UPOV TGP/1, Examining Uniformity, Di Publikasikan 19 April 2002, Jenewa, hlm. 19

<sup>22</sup> ibid

<sup>23</sup> UPOV TGP/8, Determination of Off-types by visual assessment, Di Publikasikan 30 Oktober 2008, Jenewa, hlm. 8



- a. Oleh varietas yang menyerbuk sendiri dan varietas yang diperbanyak secara vegetatif

Penentuan “*off-types*” oleh penilaian visual misalnya tanaman A harus dianggap “*off-types*” jika dapat jelas dibedakan dari variasi varietas dalam ekspresi setiap karakteristik dari seluruh atau sebagian tanaman yang digunakan dalam pengujian keunikan, dengan mempertimbangkan jenis propagasi tertentu. Berdasarkan pengertian ini membuat jelas bahwa dalam penilaian keseragaman. Penilaian standar keunikan dengan penilaian “*off-types*” dan varietas yang dimohonkan sebenarnya sama, seperti pengujian antara calon varietas dan varietas pembanding.

Dasar statistik untuk menyiapkan jumlah “*off-types*”, terdapat jumlah toleransi untuk tanaman “*off-types*” ditoleransi dalam sampel berdasarkan pada “standar populasi” dan “peluang diterima” dapat dinyatakan dalam presentasi “*off-types*” yang akan diterima jika semua varietas tanaman dari varietas yang bersangkutan telah diperiksa. Untuk batas persentase “*off-types*” diatur lebih rinci dalam TGP/10 “*Examining Uniformity*”.

- b. Penetapan keseragaman pada varietas hibrida

Penilaian keseragaman pada varietas hibrida baik hibrida galur persilangan tunggal (single cross) atau jenis lain dan apakah itu adalah hibrida yang dihasilkan dari garis bawaan induk, diperbanyak secara vegetatif atau penyerbukan silang induk-induk. Keseragaman dan kestabilan varietas hibrida sebenarnya dapat dinilai dengan



memeriksa keseragaman dan stabilitas hibrida itu sendiri atau dalam kondisi tertentu yang diperiksa adalah induk dari hibrida tersebut.

c. Variasi tanaman dari varietas yang tidak berhubungan dan sangat atipikal

Materi dari variasi tanaman mungkin berisi tanaman yang sangat khas dan tidak terkait dengan varietas yang akan diuji. Kondisi/keadaan semacam ini tidak selalu dianggap sebagai “*off-types*” atau tidak dianggap sebagai varietas yang bersangkutan dan bisa diabaikan kemudian pengujian bisa dilanjutkan, selama penghapusan variasi tanaman tersebut tidak mengakibatkan terbatasnya jumlah tanaman yang cocok untuk pemeriksaan, UPOV sendiri juga berpendapat seperti itu namun yang jelas hal ini juga tergantung pada penilaian dari ahli tanaman. Dalam prakteknya pengujian variasi/populasi varietas tanaman oleh varietas yang akan diuji, jika terdapat tanaman tunggal yang dapat mengganggu proses pengujian hal itu boleh diabaikan.

#### A.1.1.5 Pemeriksaan kestabilan

Dalam Konvensi UPOV 1961/1972 dan 1978 sudah dibahas dalam pasal 6 ayat (1) mengenai persyaratan varietas untuk memperoleh perlindungan harus memenuhi unsur kestabilan dalam karakteristik esensia, untuk menyatakan itu harus tetap konsisten sesuai dengan diskripsi varietas setelah berulang kali melalui proses perbanyakan.<sup>24</sup> Dalam Konvensi UPOV 1991 juga mengharuskan varietas untuk memenuhi syarat kestabilan hal ini tercermin dalam pasal 9 yang

<sup>24</sup> Pasal 6 ayat (1) Konvensi UPOV 1978



menyatakan bahwa varietas dianggap stabil jika karakteristik yang relevan tidak berubah setelah propagasi berulang atau dalam kasus siklus tertentu propagasi pada akhir setiap siklus keadaan ekspresi karakteristik selalu konsisten.<sup>25</sup>

#### **A.1.1.5.1 Karakteristik esensia / relevan**

Karakteristik esensia atau relevan mencakup paling tidak semua karakteristik yang digunakan semua karakteristik yang digunakan untuk uji “DUS” atau yang termasuk dalam diskripsi varietas yang dibuat pada tanggal diberikanya perlindungan atas varietas tersebut, oleh karena itu, semua karakteristik yang jelas dapat diungkap terlepas apakah karakteristik itu muncul dalam “*The Guidelines*” atau tidak.

#### **A.1.1.5.2 Metode untuk pemeriksaan kestabilan**

Dalam praktek, pemeriksaan kestabilan tidak biasa dilakukan dengan memberi hasil sama seperti dalam pengujian keunikan dan keseragaman, Namun pengalaman telah menunjukan bagi banyak jenis varietas, jika suatu varietas terbukti seragam varietas tersebut juga bisa dianggap stabil, selain itu jika varietas tidak stabil hasil bahan yang dihasilkan akan tidak sesuai dengan karakteristik varietas dan jika pemulia tidak dapat memberikan materi varietas yang sesuai hak pemulia dapat dibatalkan atau dicabut. Pemeriksaan kestabilan pada varietas hibrida dilakukan dengan pemeriksaan pada varietas hibrida itu sendiri juga dapat dinilai dengan pemeriksaan keseragaman dan kestabilan galur indunya.

### **A.1.2 Analisis Konsep Baru dan Unik dalam Konvensi UPOV Berdasarkan TGP/9 “Examining Distinctness”**

<sup>25</sup> Pasal 9 Konvensi UPOV 1991



Pembahasan pada bagian ini sebenarnya tidak akan membahas banyak hal mengenai konsep baru sebagai syarat pemberian hak PVT mengingat ternyata konteks permasalahan yang sebenarnya ada pada kriteria unik atau *Distinctness*, dalam praktek sendiri konsep syarat baru dan unik sebenarnya memiliki keterkaitan atau hubungan namun tidak terkait, maksudnya disini adalah jika suatu varietas memenuhi syarat baru varietas tersebut belum tentu memenuhi syarat keunikan, tetapi jika suatu varietas sudah memenuhi syarat keunikan sudah hampir bisa dipastikan memenuhi syarat kebaruan selama varietas tersebut pada tanggal pengajuan Hak PVT varietas atau hasil perbanyakannya belum pernah dijual, diiklankan, disebarluaskan, dihibahkan atau digunakan untuk keperluan komersial/eksploitasi lainnya dengan atau tanpa persetujuan pemulia, dengan ketentuan pengecualian:

- i. Jika diwilayah/negara pemulia permohonan sudah diajukan kurang dari satu tahun;
- ii. Diwilayah/negara lain dari negara tempat diajukan Hak PVT permohonan sudah diajukan sebelum 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan.<sup>26</sup>

Syarat baru untuk pengajuan Hak PVT sendiri pada dasarnya hampir sama dengan syarat Novelty pada Paten, oleh karena itu pada bagian ini penulis akan lebih banyak masalah kriteria atau batasan Keunikan untuk varietas tanaman baru.

#### A.1.2.1 Pemilihan Varietas Untuk Uji Pertumbuhan

Salah satu langkah terpenting dalam pemeriksaan keunikan adalah penentuan atau pemilihan varietas pengetahuan umum (yang diunakan sebagai

<sup>26</sup> Pasal 6 Konvensi UPOV 1991



varietas pembanding) dari koleksi varietas yang tersedia untuk dimasukkan dalam uji pertumbuhan.

Diskripsi varietas dapat digunakan untuk menentukan varietas-varietas yang dimasukkan dalam petak sidang pengujian. Dalam *The General Introduction* dijelaskan pada bagian 5.3.1.3 dimana calon varietas dapat dibedakan dengan cara yang diandalkan dari varietas-varietas yang menjadi pengetahuan umum dengan membandingkan diskripsi varietas (diskripsi dari varietas pengetahuan umum) tidak perlu memasukan varietas pengetahuan umum dalam kategori varietas pembanding sidang uji pertumbuhan, tetapi jika tidak ada kemungkinan yang jelas untuk membandingkan varietas pengetahuan umum dengan calon varietas, maka harus dimasukkan dalam varietas pembanding untuk dilakukan uji pertumbuhan. Karena itu pentingnya harmonisasi diskripsi varietas untuk meminimalkan beban kerja pemeriksa “DUS”. Karena itu perbedaan diskripsi varietas saja tidak cukup untuk menyimpulkan suatu varietas itu berbeda.<sup>27</sup>

Koleksi varietas untuk varietas pembanding mungkin terbatas pada jenis-jenis tertentu dari varietas atau kelompok varietas dalam spesies atau subspecies (dalam TGP/4 Bagian 2.1.1), Namun koleksi varietas bisa terdiri dari lebih dari satu jenis atau kelompok varietas, sebab itu identifikasi jenis atau kelompok varietas dalam koleksi varietas dapat menjadi langkah pertama dalam pemilihan varietas untuk dimasukkan dalam uji pertumbuhan. Jenis varietas, diartikan bahwa varietas dan jenis yang memiliki ciri-ciri umum atau khusus dan ciri-ciri fisiologi (contohnya tanaman berumur panjang dan pendek) diaman hal tersebut diakui diluar pemeriksaan “DUS”, sedangkan kelompok varietas diartikan sebagai

<sup>27</sup> UPOV TGP/1, *Clearly Distinguishing a New Variety*, Di Publikasikan 19 April 2002, Jenewa, hlm. 13



pengelompokan varietas khusus untuk pemeriksaan keunikan (misalnya panjang/pendek tipe rambut rachila pada tanaman barley)

Terkait dengan jenis varietas dalam dokumen TGP/4/1 bagian

2.2.1.2 mengidentifikasi kriteria yang berkaitan dengan jenis yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan keunikan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Pengakuan dari berbagai jenis varietas relevan dalam *Test Guidelines UPOV* atau dengan pembentukan terpisah untuk sidang uji pemeriksaan dalam jenis varietas misalnya spesies yang sama;
- b. Koleksi varietas mungkin terbatas dengan memperhatikan ciri-ciri fisiologi tertentu varietas (misalnya ketebalan baik, panjang hari kerentanan, ketahanan atau resistensi, dll) disesuaikan dengan kondisi iklim yang tepat untuk varietas yang bersangkutan.

Dimana jika jenis varietas dibentuk sesuai dengan kriteria di atas, jenis varietas mungkin dasar untuk pengecualian varietas dalam petak uji pertumbuhan untuk pemeriksaan keunikan.

Kategori fungsional karakteristik menempatkan fungsi pengelompokan karakteristik sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Karakteristik dimana ekspresi keadaan didokumentasikan, bahkan dimana dicatat lokasi yang berbeda, bisa dipakai untuk memilih, baik secara individual atau secara kombinasi dengan karakteristik lainnya, dalam konteks hal ini varietas pengetahuan umum dapat dikecualikan dari sidang uji pertumbuhan untuk pemeriksaan keunikan;

<sup>28</sup> UPOV TGP/4, Management of Variety Collection, Di Publikasikan 19 April 2002. Jenewa, hlm.

<sup>29</sup> UPOV TGP/9, *Grouping varieties on the basis of characteristics*, dipublikasikan 11 April 2008, Jenewa, hlm 8



- 2) Karakteristik dimana ekspresi keadaan didokumentasikan, bahkan dicatat dilokasi yang berbeda, dapat digunakan untuk memilih, baik secara individual atau kombinasi karakteristik lainnya untuk pengatur petak uji pertumbuhan sehingga varietas mirip dikelompokkan bersama.

Dalam fungsi yang pertama dipakai untuk mengidentifikasi peran pengelompokan karakteristik dalam memilih varietas untuk pemeriksaan individu (pemeriksaan tanaman satu persatu) disini *UPOV* sudah mengembangkan pedoman untuk pelaksanaan tes untuk keunikan, keseragaman, dan stabilitas (*Test Guidelines*) pedoman ini berguna untuk mengelompokkan. Namun seperti ditunjukkan dalam kategori fungsional no 2 pengelompokan karakteristik yang disediakan *UPOV* dalam *Test Guidelines* mempunyai dua alasan. Oleh karena itu penggunaan setiap kelompok karakteristik yang tidak termasuk varietas dari sidang uji pertumbuhan, sebagai lawan untuk penggunaannya untuk mengorganisir sidang uji pertumbuhan sehingga varietas yang mirip dikelompokkan bersama, dalam pemilihan pengelompokan varietas mirip harus dilakukan dengan hati-hati.

Terkait dengan kriteria kategorisasi fungsional karakteristik menetapkan kriteria untuk pemilihan pengelompokan karakteristik sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Karakteristik Kualitatif atau:
- 2) Karakteristik Kuantitatif atau pseudo-kualitatif yang memberikan pemisahan yang berguna antara varietas pengetahuan umum dari keadaan yang didokumentasikan oleh ekspresi yang tercatat dilokasi yang berbeda.

<sup>30</sup> *UPOV TGP/9, Criteria*, dipublikasikan 11 April 2008, Jenewa, hlm 9



Keadaan ekspresi dari pengelompokan karakteristik untuk calon varietas perlu diketahui terlebih dahulu sebelum sidang uji pertumbuhan agar bisa menggunakan informasi untuk memilih varietas dalam sidang uji pertumbuhan, karena itu pengelompokan karakteristik diidentifikasi dalam *T est Guidelines* UPOV, informasi yang diminta dalam kuisioner teknis (TQ) ada dalam dokumen TGP/7 “*Development of Test Guidelines*” menyatakan bahwa:

- a. Pengelompokan karakteristik yang dipilih di tabel karakteristik harus secara umum diberi tanda bintang ditabel karakteristik dan dimasukkan dalam angket teknis;
- b. Karakteristik TQ dipilih dari tabel karakteristik, secara umum, menerima tanda bintang di tabel karakteristik dan digunakan sebagai pengelompokan karakteristik;
- c. Karakteristik bertanda bintang tidak terbatas pada karakteristik yang dipilih sebagai kelompok atau karakteristik TQ.

Karakteristik TQ yang pada umumnya termasuk dalam kuisioner teknis untuk bertindak sebagai pengelompokan karakteristik, perlu dicatat bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu, karakteristik dapat dimasukkan dalam kuisioner teknis untuk alasan lain selain menyediakan informasi tentang pengelompokan. Karena itu terkait dengan TQ tidak harus diasumsikan selalu sesuai dengan pengelompokan.

Pengelompokan atas dasar karakteristik lain dalam “*Test Guidelines*” pemilihan pengelompokan karakteristik didasarkan pada informasi yang mungkin tersedia dari anggota yang lain dan harus meminta kuisioner teknis dari dari



pemulia. Karakteristik ini mungkin lebih lanjut juga berguna untuk pengelompokan dimana informasi yang tersedia untuk pemeriksaan “DUS” melibatkan siklus tumbuh, hal semacam ini sesuai dengan penggunaan karakteristik kuantitatif dan pseudo-kualitatif

#### **A.1.2.1.1 Penggunaan Pengelompokan Karakteristik**

Penggunaan pengelompokan karakteristik untuk mengidentifikasi varietas yang termasuk dalam koleksi varietas yang dapat dikeluarkan dari pemeriksaan uji pertumbuhan hal ini dipengaruhi oleh jenis ekspresi karakteristik yang dipilih. Pengelompokan karakteristik harus menggunakan karakteristik kualitatif atau karakteristik kuantitatif atau karakteristik pseudo kualitatif yang memberikan pemisahan atau pembedaan yang berfungsi untuk menunjukan varietas pengetahuan umum dari ekspresi keadaan yang didokumentasikan serta dicatat ditempat yang berbeda

##### **A. Karakteristik Kualitatif**

Penggunaan pengelompokan karakteristik kualitatif relatif lebih mudah karena seperti dalam aturan umum, bagian keadaan ekspresi karakteristik kualitatif menyatakan perbedaan antara dua varietas dianggap jelas apakah oleh satu atau lebih ekspresi karakteristik yang jatuh ke dua keadaan yang berbeda (menurut UPOV berdasarkan “*Test Guidelines*”), karena itu dalam karakteristik kualitatif harus sesuai pada konsistensi pengamatan calon varietas dan varietas pembanding.

Contoh: dalam kasus karakteristik kualitatif “daun : veriegation (mencat), dengan keadaan tidak ada (catatan 1), hadir (catatan 9), akan ada kemungkinan untuk mengecualikan dalam sidang uji pertumbuhan varietas



dari koleksi varietas yang akan dipakai (untuk varietas pembanding) yang tidak mencat (catatan 1), dimana calon varietas tercatat mencat (catatan 9).

## B. Karakteristik Kuantitatif dan Pseudo-Kualitatif

Dalam karakteristik kuantitatif dan pseudo-kualitatif, tidak mungkin untuk menentukan aturan umum untuk membedakan antara varietas atas dasar ekspresi keadaan yang didokumentasikan dan tercatat di lokasi yang berbeda, namun karakteristik itu dapat dipakai untuk mengelompokkan dimana terdapat perbedaan yang cukup pada bagian keadaan ekspresi varietas dalam varietas pembanding dan calon varietas dengan mengacu pada konsistensi hasil pengamatan baik dari calon varietas maupun pada varietas pembanding yang ada.

Contoh (karakteristik kuantitatif) :

Tanaman tinggi diwakili oleh sampel catatan 1 sampai catatan 9, misalnya untuk pengelompokan dalam uji pertumbuhan varietas yang sangat pendek masuk kategori (catatan 1 dan catatan 2) sedangkan tanaman yang sangat tinggi masuk (catatan 8 dan catatan 9). Jika calon varietas mempunyai tinggi sedang maka masuk (catatan 5).

Contoh (karakteristik pseudo-kualitatif)

Untuk karakteristik pseudo-kualitatif sebagai contoh “petal : warna”, dengan keadaan: putih (catatan 1); kuning (catatan 2); hijau (catatan 3); merah muda (catatan 4); ungu (catatan 5). Mungkin bisa mengecualikan (catatan 1 dan catatan 2) dari pemeriksaan uji pertumbuhan jika varietas mempunyai petal warna daun merah muda.



Dalam kasus kedua pengelompokan karakteristik kuantitatif dan pseudo-kualitatif, varietas-varietas pembandingan yang bisa dikeluarkan atau dikecualikan dari petak uji pertumbuhan ditentukan oleh pengaruh lingkungan dalam ekspresi keadaan.

### C. Pengelompokan karakteristik dalam kombinasi

Pengelompokan karakteristik dapat digunakan untuk memilih, baik secara individu atau dalam kombinasi dengan karakteristik lainnya, varietas pengetahuan umum dapat dikeluarkan dari sidang uji pertumbuhan dalam pemeriksaan keunikan. Ini mengindikasikan bahwa pengelompokan dapat digunakan dalam kombinasi untuk mengecualikan varietas dari petak uji pertumbuhan.<sup>31</sup>

Contoh (karakteristik kombinasi)

Berdasarkan sampel atau catatan, contoh yang dipakai adalah karakteristik kualitatif dan karakteristik pseudo-kualitatif

#### Calon Varietas

Daun mencat: ada (catatan 9)

Petal warna: merah muda (catatan 4)

Bisa dimungkinkan untuk pengecualian dari sidang uji pertumbuhan mengenai calon varietas: setiap varietas dengan daun mencat: tidak ada (catatan 1) dan setiap varietas dengan warna petal:kuning (catatan 2) atau hijau (catatan 3).

Pengelompokan memakai informasi dari sidang uji pertumbuhan yang sama, misalnya dari siklus pertumbuhan yang pertama dimana pemeriksa DUS

<sup>31</sup> UPOV TGP/9, *Varieties Grouping*, dipublikasikan 11 April 2008, Jenewa, hlm 9



melibatkan dua siklus tumbuh, mungkin mendapatkan tingkat perbedaan yang tinggi dari pengelompokan karakteristik, khususnya untuk karakteristik kuantitatif dan pseudo-kualitatif. Dalam kasus beberapa tanaman tahunan, misalnya pohon-pohon buah, untuk mengetahui siklus tumbuh yang kedua cukup dengan melihat siklus tumbuh yang pertama.

Penggunaan pengelompokan karakteristik dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengurangi jumlah varietas pembanding yang perlu dimasukkan dalam sidang uji pertumbuhan. Secara khusus dalam keadaan tertentu dimana ada sejumlah kecil varietas dan baik jumlah pengelompokan karakteristik dengan tingkat perbedaan tinggi, jumlah varietas pembanding yang dikecualikan atau dikeluarkan dari sidang uji pertumbuhan bisa banyak. Tetapi dalam keadaan lain dimana secara khusus terdapat banyak dalam varietas dan beberapa pengelompokan karakteristik perbedaan itu sudah bisa dideteksi sebelum pemeriksaan, mungkin untuk pengecualian dari petak sidang uji pertumbuhan terbatas karena ada calon varietas dalam banyak / secara kelompok yang didefinisikan oleh pengelompokan karakteristik.

#### **A.1.2.2.2 Kombinasi dalam karakteristik**

Karakteristik yang dipilih dapat digunakan dalam kombinasi untuk memilih varietas dalam petak sidang uji pertumbuhan, perbedaan status ekspresi karakteristik yang dipilih dengan nilai yang cocok dikaitkan dengan perbedaan, dapat dipakai untuk mengidentifikasi varietas untuk dipakai menjadi varietas pembanding yang dapat dikecualikan dari sidang uji pertumbuhan. Dalam rangka untuk memastikan bahwa varietas yang dikecualikan pada dasarnya memang tidak terkait, dalam artian apabila varietas benar-benar berbeda dengan semua varietas



yang dikecualikan tersebut, karakteristik yang tepat harus dipilih dan cukup tinggi nilai keunikan tambahannya. Karakteristik yang dipilih dianggap karakteristik dari karakteristik dasar dan bobot hanya diberikan kepada perbedaan untuk karakteristik dimana perbedaan tersebut atas dasar pengalaman diketahui secara jelas dan konsisten. Secara khusus, pendekatan seperti ini tidak akan menggunakan kombinasi dari perbedaan “kecil” dalam rangka untuk mencapai tahap keunikan tambahan atau melampaui ambang batas keunikan.

- Keunikan tambahan

Batas keunikan tambahan yang digunakan untuk mengecualikan varietas dalam koleksi varietas (varietas pembanding) dari petak percobaan, diatur oleh pemeriksa “DUS” pada tingkat yang lebih tinggi dari ambang batas yang diperlukan untuk membangun keunikan. Ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa semua pasangan varietas yang memenuhi atau melebihi batas keunikan tambahan akan terbukti berbeda jika tumbuh bersama dalam sidang uji pertumbuhan.

Disini yang perlu diperhatikan adalah pentingnya keunikan tambahan yang didasarkan pada pengalaman yang diperoleh dari varietas pengetahuan umum dan untuk meminimalkan resiko termasuk varietas pengetahuan umum yang harus dibandingkan dengan satu atau lebih varietas pembanding dengan calon varietas dalam sidang uji pertumbuhan.

#### A.1.2.2.3 Foto-foto

Foto-foto dari varietas yang akan di uji dapat memberikan informasi yang berguna sebagai dasar untuk pengecualian varietas dalam varietas pembanding dari petak sidang uji pertumbuhan yang digunakan untuk pemeriksaan keunikan.



Dalam keadaan tertentu, foto bisa memberikan informasi karakteristik yang tidak termasuk dalam TQ (kuisisioner teknis). Misalnya kesulitan dalam pencatatan pada warna struktur tanaman, karena itu foto bisa sangat membantu dalam hal untuk menunjukkan bukti perbedaan yang ada antara calon varietas dan varietas pembanding.

Dalam dokumen TGP/7 menunjukkan bahwa, dimana berguna untuk pemeriksaan “DUS”, dalam *Test Guidelines* mengharuskan foto berwarna sebagai bukti perbedaan yang mentertai bukti informasi yang diberikan dalam kuisisioner teknis. Khusus untuk keadaan seperti itu UPOV menganjurkan memberikan kewenangan untuk meningkatkan kegunaan foto itu (misalnya untuk memasukan skala matrik dan skala warna pada gambar foto). Tetapi penggunaan foto untuk memilih varietas yang digunakan untuk sidang uji pertumbuhan harus benar-benar dipertimbangkan, karena foto mungkin tidak selalu akurat mencerminkan karakteristik varietas.

Jika varietas koleksi (varietas pembanding) merupakan varietas hibrida, mungkin cara yang tepat untuk menentukan atau memilih varietas yang dimasukan dalam sidang uji pertumbuhan menggunakan formula atau rumus induk dari varietas hibrida tersebut. Penggunaan formula induk mensyaratkan bahwa perbedaan antara garis orang tua sudah cukup untuk memastikan bahwa hibrida yang diperoleh dari hibrida yang berbeda.

Terdapat faktor-faktor yang dapat digunakan untuk memilih varietas yang dicantumkan dalam uji pertumbuhan berikut ini adalah sumber-sumber informasi yang berguna antara lain :

a). Ahli “DUS” dari anggota UPOV yang lain;



b) Pemulia/ pemohon melalui:

I. Informasi yang diberikan dalam bagian 5 dari kuisioner teknis  
(karakteristik yang akan ditunjukkan oleh pemohon)

II. Informasi yang diberikan dalam bagian 6 dari kuisioner teknis  
(varietas dan perbedaan dengan varietas sejenis yang paling mirip)

III. Informasi yang diberikan dalam bagian 7 dari kuisioner teknis  
(informasi tambahan yang dapat membantu dalam pemeriksaan  
variasi, termasuk misalnya foto)

IV. Informasi tambahan

c) Ahli tanaman lainnya.

Informasi diatas berguna untuk menentukan jenis varietas pengetahuan umum  
yang akan digunakan sebagai varietas pembanding.

#### A.1.2.2 Pengamatan Karakteristik

Sebuah dasar hukum internasional yang digunakan untuk acuan  
pengamatan varietas adalah “*Test Guidelines*” yang dibuat oleh UPOV. Dokumen  
TGP/7/1 lampiran 3 menjelaskan salah tujuan untuk pemasukan varietas dalam

“*Test Guidelines*” yang berguna untuk menggambarkan ekspresi dari  
karakteristik. Namun terkadang terdapat kesulitan dalam memilih contoh varietas  
yang cocok untuk memenuhi semua persyaratan untuk bisa dimasukkan dalam  
“*Test Guidelines*” ini berarti bahwa satu perangkat aturan tidak selalu sesuai  
untuk semua karakteristik.

Pelatihan yang sesuai diperlukan untuk memastikan bahwa pengamatan  
oleh pemeriksa bisa akurat dan konsisten sehingga pengulangan antara



pengulangan bisa dilakukan. Akurasi, konsistensi dan pengulangan yang penting untuk penggunaan diskripsi varietas dalam proses pemeriksaan keunikan.

Meskipun terdapat fakta bahwa variasi bisa berubah/ tidak sama dari diskripsi varietas akibat dari pengaruh lingkungan hidup. Selain menggambarkan keadaan ekspresi karakteristik, tujuan lain dari contoh varietas dalam “*Test Guidelines*” UPOV adalah untuk memberikan dasar mengenai keadaan ekspresi yang sesuai untuk masing-masing varietas. Sehingga dengan demikian dapat memfasilitasi pengembangan harmonisasi secara internasional terkait dengan diskripsi varietas.

Memang sulit untuk mengidentifikasi contoh varietas yang dapat memenuhi persyaratan secara universal.

#### **A.1.2.2.1 Metode Observasi/ Pengamatan (Visual atau Pengukuran)**

##### **A. Pengamatan Visual (V)**

Pengamatan visual (V) adalah pengamatan yang dilakukan atas dasar penilaian ahli, pengamatan visual menitik beratkan pada sensor panca indra dari pengamatan para ahli meliputi bau, rasa, penglihatan, bentuk dan sentuhan. Pengamatan visual meliputi pengamatan dimana ahli menggunakan titik acuan (misalnya diagram atau grafik non linier misalnya grafik warna).

Persyaratan visual dapat digunakan jika memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam pemeriksaan “DUS”. Pengamatan visual umumnya lebih cepat dan lebih mudah dari pada pengukuran tetapi karena didasarkan penilaian para ahli, untuk menjadi seorang ahli dalam pengamatan visual memiliki syarat-syarat yang penting seperti pelatihan dan pengalaman untuk memastikan bahwa pengamatan oleh pemeriksa “DUS” atas suatu karakteristik bisa akurat, konsisten dan



pengulangan antar pengamatan bisa dilakukan (dapat digunakan sebagai acuan untuk pemeriksaan calon varietas selanjutnya)

#### B. Pengukuran/ Measurement (M)

Pengukuran adalah pengamatan objektif terhadap kalibrasi (tanda-tanda yang menyatakan pembagian skala, skala linier misalnya menggunakan penggaris, timbangan, colorimeter, penghitungan tanggal, jumlah, dll.

#### C. Pemilihan metode pengamatan berdasarkan jenis ekspresi karakteristik:

- i. Karakteristik Kualitatif (QL): secara umum diamati secara visual;
- ii. Karakteristik Kualitatif (QN): dapat diamati secara visual atau pengukuran;
- iii. Karakteristik Pseudo-Kualitatif (PQ): secara umum diamati secara visual.

Pengamatan visual biasanya tidak terlalu memakan waktu dibandingkan dengan pengukuran, tetapi pengukuran memberikan data yang lebih tepat yang mungkin bisa digunakan untuk pemeriksaan keunikan.

#### D. Jenis Catatan (s)

Untuk keperluan keunikan, pengamatan dapat dicatat sebagai rekor tunggal untuk kelompok tanaman atau bagian tanaman (G) atau dicatat sebagai catatan tunggal individu tanaman atau bagian tanaman (s). Dalam kebanyakan kasus "G" memberikan catatan tunggal per variasi dan tidak mungkin atau diperlukan untuk menerapkan metode statistik analisis penilaian keunikan.

Jika terdapat sedikit variasi varietas (tidak termasuk *off types*), dibandingkan dengan variasi antar varietas, keadaan ekspresi karakteristik dapat dicatat sebagai rekor tunggal untuk kelompok tanaman atau bagian tanaman (G), untuk penilaian keunikan. Kondisi ini terpenuhi di sebagian besar karakteristik di



tanaman yang menyerbuk sendiri dan vegetatif dan sering dipenuhi untuk karakteristik kualitatif dan pseudo-kualitatif, dalam beberapa keadaan keadaan karakteristik kuantitatif dalam tanaman yang menyerbuk sendiri dan varietas yang diperbanyak secara vegetatif, mungkin tepat untuk mendapat catatan tunggal, tanaman individu atau bagian tanaman (s).

Catatan bagian tanaman (G) dapat berupa misalnya catatan (sampel varietas 1,2,3 dst) sesuai dengan keadaan ekspresi dalam “*Test Guidelines*” nialai (misalnya nomor referensi diagram KHS warna); pengukuran (misalnya panjang [cm], berat [gram] ), gambar dan lain-lain. Catatan bagian tanaman atau kelompok tanaman (G) mungkin akibat dari pengamatan keseluruhan plot (misalnya: warna daun, saat awal berbunga) atau mungkin hasil pengamatan keseluruhan bagian tanaman diambil dari kelompok tanaman (misalnya warna sisi buah daun, keadaan berbulu dari selubung bawah daun). Ukuran sampel kelompok harus benar-benar mewakili varietas yang bersangkutan.

- Contoh pengamatan Visual (VG)

“jenis bunga” pada tanaman tulip (diperbanyak secara vegetatif) bunga diamati dan keadaan yang sesuai ekspresi dicatat untuk varietas: catatan 1 (tunggal); catatan 2 (ganda)

- Contoh pengamatan visual (VG)

“daun kecil: berbulu selubung daun” pada tanaman barley (menyerbuk sendiri): daun beberapa tanaman diamati dan keadaan yang sesuai dengan ekspresi dicatat untuk varietas: catatan 1 (tidak ada bulu) atau catatan 9 (sekarang ada)

- Contoh pengamatan melalui pengukuran (MG)



“tanaman tinggi” pada tanaman gandum (menyerbuk sendiri): perwakilan pengukuran dalam plot

Ada beberapa keadaan, kelompok tanaman atau bagian tanaman (G) memberikan catatan tunggal per variasi dan tidak mungkin diperlukan untuk menerapkan metode statistik dalam analisis tanaman pertanaman untuk menilai keunikan.

Tetapi dalam beberapa kasus “G”, misalnya dimana ada beberapa pengulangan atau plot atau lebih dari satu percobaan tumbuh.

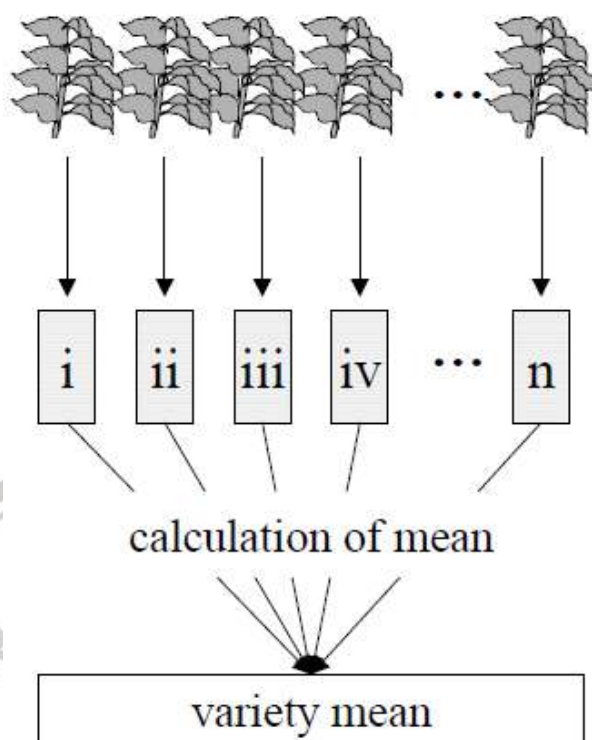
Dalam kasus dimana catatan untuk sejumlah tanaman tunggal, individu tanaman yang dibuat (S), analisis statistik catatan-catatan individu dapat digunakan sebagai dasar untuk penilaian keunikan atau catatan dapat digunakan sebagai dasar untuk penilaian keunikan atau paling tidak digunakan untuk menghitung varietas untuk plot, yang akan digunakan sebagai dasar penilaian keunikan.

Catatan untuk individu tanaman mungkin cocok untuk beberapa karakteristik kuantitatif dalam menyerbuk sendiri dan varietas yang diperbanyak secara vegetatif, namun secara khusus pengamatan pada bagian-bagian tertentu tanaman mungkin perlu untuk mengukur sejumlah individu tanaman untuk menentukan ekspresi yang tepat dari varietas dengan menghitung nilai rata-rata pengukuran individu

- Contoh penghitungan rata-rata (MS)

“pucuk daun muda: panjang” pada tanaman Pea (dengan sistem perbanyakan menyerbuk sendiri): daun dari masing-masing 20 tanaman diukur nilai dari setiap tanaman yang dipakai untuk penghitungan nilai rata-rata dijelaskan dalam gambar berikut (4.3.3.1)





*Contoh (MS): Leaflet: length*

*(pea: self-pollinated)*

Sumber: TGP/9 "EXAMINING DISTINCTNESS" page 21

Jika terdapat cukup banyak variasi dalam varietas, yang merupakan situasi normal untuk karakteristik kuantitatif dalam varietas menyerbuk silang, maka perlu untuk mendapatkan catatan untuk individu tanaman untuk menentukan ekspresi dan variasi dalam varietas. Keunikan kemudian dinilai dengan membandingkan varietas berarti dihitung berdasarkan dari data individu tanaman



dengan memperhitungkan dan untuk memperkirakan variasi acak untuk menilai keunikan.

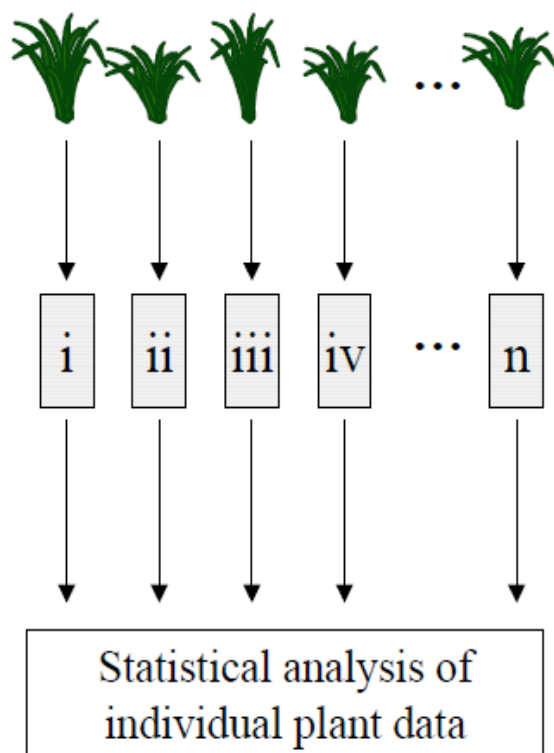
- Contoh MS

“tanaman tinggi alami” pada tanaman ryegrass (penyerbukan silang): 60 tanaman diukur (MS). Nilai yang digunakan dari setiap tanaman yang digunakan untuk perhitungan mean dan untuk memperkirakan variasi acak untuk penilaian keunikan.

- Contoh VS

Tanaman: kebiasaan pertumbuhan” pada tanaman ryegrass (menyerbuk silang): 60 tanaman diamati secara visual (VS). Nilai dari setiap tanaman yang digunakan untuk perhitungan mean dan untuk memperhitungkan variasi acak untuk penilaian keunikan.





Exampel (MS): Plant: natural height

Exampel (VS): Plant growth habit (ryegrass: cross-pollinated)

Sumber: *TGP/9 EXAMINING DISTINCTNESS* page 21

Dari penjelasan yang sudah diuraikan diatas dapat dibuat ringkasan dalam bentuk tabel mengenai metode pengamtan dan jenis catatan untuk penilaian keunikan.

	Jenis Ekspresi Karakteristik		
Metode Propagasi	QL	PQ	QN
Propagasi vegetatif	VG	VG	VG/MG/MS
Penyerbukan sendiri	VG	VG	VG/MG/MS
Penyerbukan silang	VG/(VS*)	VG/(VS*)	VS/VG/MS/MG
Hibrida	VG/(VS*)	VG/(VS*)	**



## A.2. Bentuk syarat baru dan unik berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia

Seperti yang kita semua ketahui bahwa Hak Perlindungan Varietas Tanaman merupakan salah satu ketentuan dalam HKI yang paling terakhir ada setelah rezim-rezim HKI lainnya dalam sejarah perlingkungannya sebagai hak kebendaan tidak berwujud (immaterial) yang diberikan oleh negara kepada pemulia varietas tanaman baru. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman baru mulai diatur sejak tahun 1989 namun pengaturannya masih dicampur bersama dengan Undang-Undang Paten Tahun 1989 namun dalam peraturan tersebut terdapat pengecualian atas varietas-varietas tertentu yang tidak bisa dipatenkan seperti tanaman padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.<sup>32</sup> Namun pada tahun 1997 undang-undang tersebut mengalami amandemen yaitu berupa penghapusan atau pencabutan terhadap ketentuan pelarangan pemberian perlindungan terhadap makanan, minuman, dan varietas tanaman tertentu, sehingga setelah amandemen atau sejak berlakunya Undang-Undang Paten Tahun 1997 makanan, minuman dan varietas tanaman bisa memperoleh perlindungan hukum melalui hak Paten.<sup>33</sup>

Alasan utama diamandemennya Undang-Undang Paten 1989 adalah akibat dari keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi ketentuan TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights), dimana dalam ketentuan TRIPs dalam pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa: However, member shall provide for the protection of plants varieties either by patents or by an effective sui generis system

<sup>32</sup> Pasal 7 huruf c, Undang-Undang Paten Tahun 1989

<sup>33</sup> Tim Pengkajian Hukum Kemenkumham, Laporan Akhir tentang Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional.



or by any combination thereof. Dari pasal tersebut terlihat bahwa dalam perjanjian TRIPs setiap anggota yang meratifikasi peraturan ini diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, baik melalui paten, sistem sui generis yang efektif atau kombinasi dari paten dan sistem sui generis.

Karena sebab-sebab itu tadi maka mulai muncul peraturan-peraturan yang menyangkut dengan perlindungan varietas tanaman seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan peraturan terkait lainnya yang mempunyai titik-titik dibawah undang-undang yang berfungsi untuk memudahkan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut.

#### **A.2.1 Syarat-syarat untuk memperoleh Hak Perlindungan Varietas Tanaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman**

Hak Perlindungan Varietas Tanaman merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pemulia tanaman dan/atau pemegang Hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.<sup>34</sup> Varietas sendiri diartikan sebagai sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang

<sup>34</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman



kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.<sup>35</sup>

Pernyataan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman merupakan salah satu dasar penting dalam penentuan varietas tanaman baru yang bisa diberi Hak Perlindungan Varietas Tanaman, karena sebenarnya dari pasal secara implisit menyatakan bahwa Perlindungan Varietas Tanaman diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang:

1. Baru;
2. Unik;
3. Seragam;
4. Stabil;
5. Terdapat tambahan syarat sesuai dengan pasal 2 ayat (6) yaitu berupa pemberian nama varietas dengan ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang ini.

Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari satu tahun atau telah diperdagangkan diluar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.<sup>36</sup> Dari situ sebenarnya sudah agak kelihatan mengenai kriteria

baru untuk varietas yang dimohonkan hak Perlindungan Varietas Tanaman yaitu

<sup>35</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

<sup>36</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang perlindungan Varietas Tanaman





pada kata belum pernah diperdagangkan atau sudah diperdagangkan tetapi tidak melebihi batas waktu yang ditentukan oleh pasal tersebut, arti kata diperdagangkan sendiri menurut kamus besar bahasa indonesia diambil dari kata dagang yang artinya “suatu kegiatan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan”.<sup>37</sup> Sementara suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaanya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan hak Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>38</sup>

Suatu varietas bisa dianggap seragam jika sifat-sifat penting atau utama pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.<sup>39</sup> Sementara suatu varietas dikatakan stabil jika sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk diperbanyak melalui siklus memperbanyak khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.<sup>40</sup> Yang dimaksud dengan varietas apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil di dalam proses memperbanyak benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan dan stek.<sup>41</sup>

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <http://kbbi.web.id/dagang>, pada tanggal 8 Juli 2015 pukul 08:15

<sup>38</sup> Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

<sup>39</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

<sup>40</sup> Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

<sup>41</sup> Krisnani Setyowati dkk, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA DI PERGURUAN TINGGI, Kantor HKI IPB, Bogor, 2005, hlm 64



Varietas yang dapat diberi Hak Perlindungan Varietas Tanaman harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa:<sup>42</sup>

- a. nama varietas terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis;
- b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
- c. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT;
- d. apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru ;
- e. apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan oleh varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
- f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

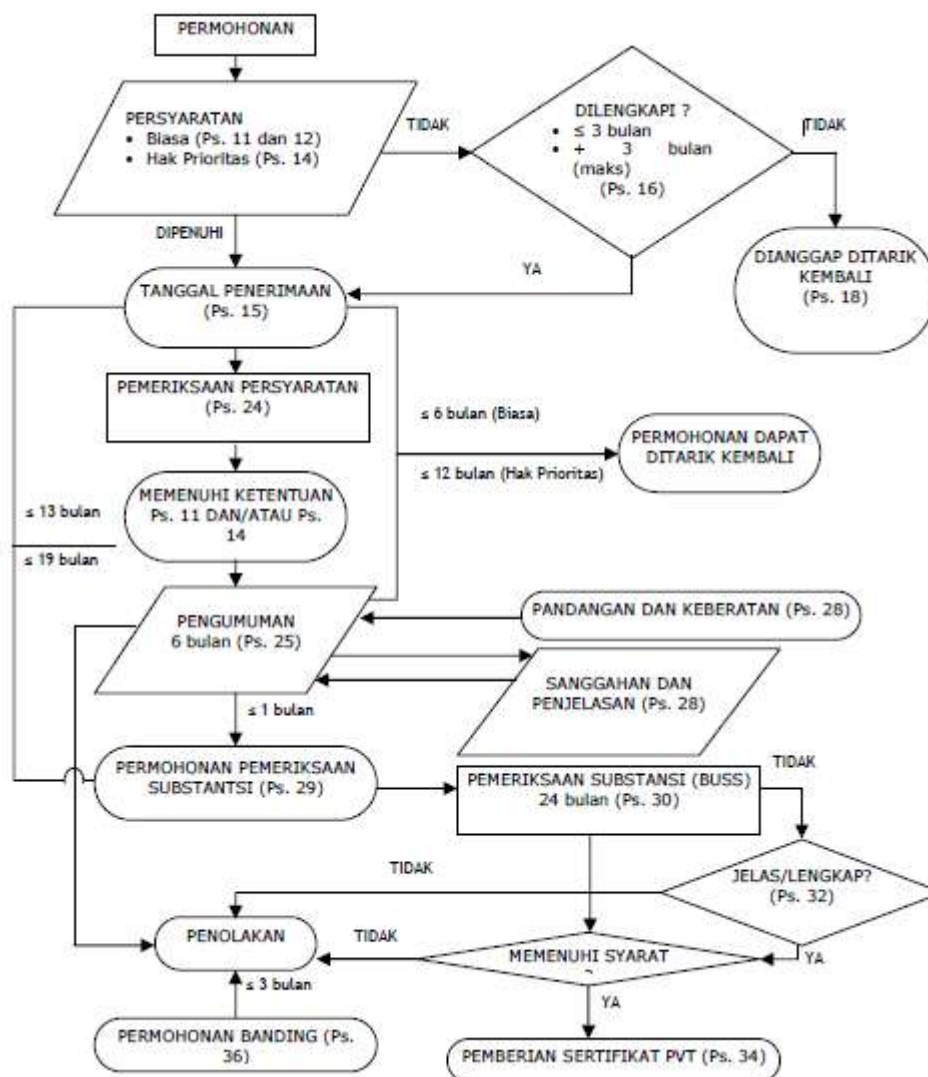
Untuk mengembangkan varietas tanaman baru dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui pemuliaan tanaman klasik dan melalui bioteknologi, misalnya rekayasa genetika. Varietas yang dihasilkan baik melalui rekayasa genetika maupun metode pemuliaan klasik dilindungi dengan Perlindungan Varietas Tanaman, Tetapi metode atau proses pemuliaan untuk menghasilkan varietas tanaman baru dilindungi dengan Paten.

Berikut ini merupakan alur proses permohonan Hak Perlindungan Varietas samapai pada dikeluarkannya sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanama

<sup>42</sup> Pasal 2 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman



## Tahap-tahap memberikan sertifikat Hak PVT



Sumber: [ppvt.setjen.pertanian.go.id](http://ppvt.setjen.pertanian.go.id)

### A.2.2 Analisis Kriteria Syarat Baru dan Unik dalam Undang-Undang

#### Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Untuk mencari tahu batasan makna baru dan unik dari suatu varietas baru diperlukan pemahaman yang mendalam dari sejarah pembentukan undang-undang ini serta bagaimana relevansi undang-undang ini terhadap perkembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi pebenihan. Karena itu pada bagian ini penulis akan mengulas sejauh mana batasan baru dan unik pada suatu calon varietas yang akan dimohonkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

#### **A.2.2.1 Analisis Kriteria Syarat Baru dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman**

Makna baru berdasarkan kamus besar bahasa indonesia diartikan: 1 Belum pernah ada (dilihat) sebelumnya, 2 Belum pernah didengar (ada) sebelumnya, 3 belum lama selesai (dibuat/diberikan).<sup>43</sup> Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu varietas bisa dianggap baru jika pada saat varietas tersebut diajukan/dimohonkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari satu tahun, atau telah diperdagangkan diluar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman tidak dijelaskan dalam penjelasan Umum mengenai pasal ini seperti mengenai apasaja yang dimaksud dengan bahan berbanyakan dan hasil panen dari varietas, apa saja yang dimaksud dengan diperdagangkan, apa yang dimaksud dengan tanaman semusim dan tahunan.

Yang dimaksud dengan bahan perbanyakan dari varietas dalam hal ini merupakan bagian dari varietas yang bisa digunakan untuk proses perkembangbiakan varietas bisa biji, batang, daun atau bagian tanaman lainnya yang dimungkinkan untuk bisa dipakai sebagai proses perkembangbiakan,

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <http://kbbi.web.id/baru>, pada tanggal 10 Juli 2015 pukul 18:40.



sedangkan hasil panen merupakan semua bagian tanaman yang dihasilkan setelah proses penanaman yang bisa dimanfaatkan atau dikomersilkan, selanjutnya yang dimaksud dengan diperdagangkan merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh suatu keuntungan,<sup>44</sup> Selanjutnya yang dimaksud dengan tanaman semusim atau tanaman berumur pendek merupakan tanaman yang pada umumnya berumur kurang dari satu tahun dan pemanenannya dilakukan sekali panen contohnya seperti jagung, melon, semangka dll, sedangkan tanaman tahunan merupakan tanaman yang berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen contohnya seperti mangga, rambutan, jeruk dll.<sup>45</sup>

Syarat baru pada penganjuan Hak Perlindungan Varietas Tanaman tentunya sangat berbeda dengan syarat kebaharuan pada permohonan Hak Paten namun juga memiliki kesamaan, perbedaannya adalah pada syarat kebaruan dalam Hak Perlindungan Varietas Tanaman dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman pembatasan baru ditekankan pada belum diperdakankannya bahan atau hasil panen dari varietas yang akan dimohonkan, sedangkan batasan kebaharuan atau *Novelty* pada Paten ditekankan pada belum dipublikasikannya invensi yang akan dimohonkan hak Paten, makna diperdagangkan tentunya lebih sempit dari pada makna dipublikasikan, seperti yang sudah saya jelaskan diperdagangkan diartikan sebagai kegiatan menjual dan membeli untuk tujuan memperoleh keuntungan sementara publikasi yang

dimaksud dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2000 tentang Paten lebih luas dari

<sup>44</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <http://kbbi.web.id/dagang>, pada tanggal 10 Juli 2015 pukul 18:44.

<sup>45</sup> Umy Zaki, Perbedaan Tanaman Tahunan dan Tanaman Semusim, diakses melalui <http://blog.umi.ac.id/zaki/2011/11/18/perbedaan-tanaman-tahunan-dan-tanaman-semusi/>, pada tanggal 10 Juli 2015 pukul 18:44



sekedar itu, publikasi atau pengungkapan secara umum hasil penemuan atau penelitian dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebelum pengajuan permohonan Hak Paten, Publikasi ini bisa terjadi melalui tiga cara pertama melalui pameran suatu produk yang terkait dengan invensi yang akan dimohonkan, melalui pengurai teknik dengan tulisan yang di publikasikan (tentunya uraian teknik yang terkait dengan invensi yang akan dimohonkan) dan yang ketiga adalah melalui penggunaan invensi di depan umum, tidak memperdagangkan invensi jelas juga masuk dalam kategori kegiatan mempublikasikan. Dari uraian diatas jelas bahwa makna baru dalam syarat pengajuan Hak Paten lebih luas dari pada makna baru dalam syarat pengajuan Hak PVT.

Kriteria tidak boleh diperdagangkan sebelum pengajuan Hak Perlindungan Varietas Tanaman dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman berbeda dengan ketentuan baru dalam Konvensi UPOV 1991 yang berbunyi seperti berikut ini:

*(1) [Criteria] The Variety shall be deemed to be new if, at the date of filing of the application for a breeder's right, propagation or harvested material of the variety has not been sold or otherwise of to others, by or with the consent of the breeder, for purposes of exploitation of the variety<sup>46</sup>*

- i. *in the territory of the Contracting Party in which the application has been filed earlier than one year before that date and*

<sup>46</sup> Pasal 6 ayat (1) Konvensi UPOV 1991



- ii. *in the territory other than that of the Contracting Party in which the application has been filed earlier than four years or, in the case of trees or vines, earlier than six years before the said date.*

Pasal diatas bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

(1) [Kriteria] Suatu varietas dianggap baru jika pada saat tanggal pengajuan permohonan Hak Pemulia, bahan perbanyakan atau hasil panen belum dijual atau diberitahukan kepada orang lain, oleh atau dengan persetujuan pemulia untuk tujuan eksploitasi varietas.

- i. Di wilayah pihak dimana permohonan itu diajukan minimal satu tahun sebelum tanggal permohonan diajukan dan
- ii. Di wilayah lain diluar (luar negeri) permohonan diajukan sebelum empat tahun atau dalam kasus tanaman tahunan minimal enam tahun sebelum permohonan diajukan.

Pasal 6 ayat (1) tersebut mempunyai makna yang sama dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman namun karena pasal tersebut merupakan sumber utama yang dipakai dalam pembuatan pasal 2 ayat (2) UU No 29 Tahun 2000 PVT.

Masalah lain yang sebenarnya ada adalah terkait adanya ketentuan mengenai kriteria baru yang mensyaratkan varietas tidak boleh diperdagangkan diluar negeri minimal empat tahun untuk tanaman semusung dan enam tahun untuk tanaman tahunan sebelum permohonan diajukan, pertanyaannya adalah bagaimana Pusat Perlindungan Varietas Tanaman mencari tahu suatu varietas yang akan didaftarkan belum pernah diperjual belikan diluar negeri, mengingat



Indonesia sampai saat ini belum menjadi anggota dari UPOV. Hal ini perlu diperhatikan karena terkait dengan sistem pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman menganut asas *first to file* yang mana dalam asas ini suatu pemberian hak didasarkan atas pemohon hak pertama bukan didasarkan atas penggunaan invensinya atau biasa disebut sistem pendaftaran konstitutif yang mana pendaftaran varietas merupakan suatu keharusan agar varietas tersebut mendapatkan perlindungan hukum.<sup>47</sup>

#### **A.2.2.2 Analisis Kriteria Syarat Unik dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman**

Pengertian unik sendiri berdasarkan kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai sesuatu yang tersendiri dalam bentuk atau jenisnya, lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, sedangkan keunikan diartikan sifat atau keadaan khusus yang istimewa.<sup>48</sup> Menurut Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman Suatu varietas dikatakan unik apabila varietas tersebut bisa dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaanya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>49</sup>

Dari uraian pasal tersebut dapat ditarik beberapa poin penting mengenai kriteria keunikan antarlain:

1. Varietas bisa dibedakan secara jelas

<sup>47</sup> Sudargo dan Rizawanto Winata, Hukum Merek Indonesia, PT Citra, Adityabakti, 1996, hlm 335

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <http://kbbi.web.id/unik>, pada tanggal 11 Juli 2015 pukul 11:23

<sup>49</sup> Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman



2. Dengan varietas lain yang keberadaanya sudah menjadi “pengetahuan umum”

Dalam poin pertama mengatakan bahwa varietas yang akan dimohonkan harus bisa dibedakan secara jelas tentunya berdasarkan argumen ini setiap pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman mempunyai Varietas yang secara hukum bisa dibedakan secara jelas dalam hal ekspresi karakteristik atau sifat-sifat lainnya, tetapi anehnya kenapa ada satu varietas yang sama dan mirip namun hak PVTnya dipegang oleh dua pihak yang berbeda dan salah satu pihak merasa dirugikan dengan hal tersebut, uji keunikan memang salah satu tahap yang paling menentukan dalam proses pemberian hak PVT dari tahap ini lah akan diketahui apakah suatu varietas sudah benar-benar berbeda dari varietas lain yang diketahui secara umum. Dalam UPOV sendiri selalu ditegaskan pentingnya pengalaman dan pelatihan untuk para penguji “DUS” dalam hal ini termasuk penguji keunikan seorang ahli dalam pengamatan visual memiliki syarat-syarat yang penting seperti pelatihan dan pengalaman untuk memastikan bahwa pengamatan oleh pemeriksa “DUS” atas suatu karakteristik bisa akurat, konsisten dan pengulangan antar pengamatan bisa dilakukan (dapat digunakan sebagai acuan untuk pemeriksaan calon varietas selanjutnya)

Hal lain yang menarik adalah sampai sejauh mana pengertian pengetahuan umum menurut undang-undang ini, yang dimaksud pengetahuan umum disini apakah sampai batas diketahui oleh masyarakat dunia, Asia, Asean, atau dalam lingkup cakupan negara Indonesia. Jika pengetahuan umum disini sampai batas diketahui oleh masyarakat dunia, pertanyaan saya adalah bagaimana para penguji BUSS di Indonesia bisa mendapatkan materi deskripsi varietas dan/atau



mendapatkan sampel varietas pembanding dari varietas pengetahuan umum yang berada diluar yuridiksi Indonesia mengingat sampai saat ini Indonesia masih belum menjadi anggota UPOV. Diskripsi varietas dan/atau sampel varietas merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses pengujian karena bahan-bahan tersebut digunakan sebagai varietas pembanding untuk proses pengujian keunikan calon varietas yang akan dimohonkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Uji Baru, Unik, Seragam dan Stabil atau biasa disebut uji BUSS merupakan syarat yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman, mengidentifikasi tanaman dengan menggunakan karakter suatu varietas tanaman berdasarkan tanda-tanda Morfologi baik kualitatif, kuantitatif, atau pseudokualitatif.

Pada tahap memeriksa awal pemohon diminta menjelaskan nama botani, nama yang akan diusulkan serta nama sinonim atau nama dagang yang ada untuk varietas tersebut. Selanjutnya dalam pemeriksaan substantif pemulia diminta menyebutkan sifat-sifat yang paling penting yang akan membedakan antara varietas yang akan dimohonkan Hak Perlindungan Varietas Tanaman dengan: tetuanya ( janntan, betina), varietas lain yang paling mirip, atau varietas lain yang dianggap perlu. Jika diperlukan keterangan tambahan dapat dibuat pada lembar tersendiri lampiran diskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologidan sifat-sifat penting lainnya, serta gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang dipakai untuk memperjelas deskripsinya.<sup>50</sup>

<sup>50</sup>Formulir Model 1, FORMULIR PERMOHONAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Jakarta, 2013



Dalam menyusun Diskripsi Varietas, pemohon harus menggunakan informasi yang diperoleh dari uji banding (uji BUSS) di Indonesia atau laporan uji banding di negara asal varietas tersebut, disini terlihat bahwa beban pembuktian keunikan varietas dibebankan pada pemohon Hak Perlindungan Varietas Tanaman,<sup>51</sup> lalu pertanyaan selanjutnya bagaimana Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mengklarifikasi atau mencocokkan data yang ada dari varietas yang bersal dari luar negeri jika Indonesia belum menjadi anggota dari UPOV.

Dalam diskripsi karakter dari varietas harus diuraikan berdasarkan urutan tanaman sebagai berikut: Tanaman, Batang, Daun, Tandan Bunga, Buah dan bagiannya, Biji, Sifat lainnya (seperti: ketahanan terhadap hama atau penyakit, toleransi terhadap cekaman, kualitas, data DNA, dsb). Untuk karakter yang merupakan bagian tanaman agar diurutkan sebagai berikut: habitat, tinggi, panjang, lebar, ukuran, bentuk, warna (dapat mengacu pada bagan warna yang telah baku), dan lain-lain.<sup>52</sup>

Untuk varietas hibrida harus diuraikan secara terperinci mengenai prosedur pemuliaan yang digunakan untuk menghasilkan varietas yang dimohonkan hak PVT. Penjelasan mengenai kapan dan dimana pengamatan pertama; jumlah generasi yang diseleksi, cara perbanyakan dari setiap generasi, jumlah generasi dari varietas tersebut yang sebagaimana bentuknya sekarang; adanya tipe simpang atau “off-types” dan keterangan lain yang ada hubungannya dengan pemuliaan varietas yang dimohonkan.

<sup>51</sup> Formulir Model 1, FORMULIR DISKRIPSI VARIETAS BARU, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, dan Perizinan Pertanian, Jakarta, 2013

<sup>52</sup> ibid



Tahap yang sangat menentukan dalam pengujian keunikan adalah tahap pemilihan varietas pembanding, disarankan agar pemulia/ pemohon melakukan penelitian lagi sebelum melakukan seleksi akhir. Pada tahap ini harus disebutkan alasan pemilihan varietas pembanding yang digunakan dalam uji banding. Selanjutnya tahap uji banding pada tahap ini akan diuji sifat-sifat tanaman yang unik berdasarkan: sifat unik (kualitatif), sifat yang diukur (pseudokualitatif) dan sifat unik (kuantitatif).<sup>53</sup>

**B. Akibat hukum terhadap pemegang sertifikat Hak PVT apabila terdapat dua sertifikat Hak PVT yang berbeda tetapi ternyata varietas yang didaftarkan merupakan satu varietas yang sama secara visual dan genetik**

#### **B.1. Beberapa sistem pendaftaran Hak dalam HKI**

Terdapat dua sistem perlindungan hak dalam HKI saat ini yang pertama adalah sistem deklaratif dan yang kedua adalah sistem pendaftaran konstitutif. Cabang HKI yang menggunakan kedua sistem ini adalah Hak Cipta, dalam hak Cipta setiap penemu langsung mendapat perlindungan hukum setelah menemukan suatu ciptaan yang nyata tanpa harus mendaftar terlebih dahulu kepada Dirjen HKI, sementara cabang HKI lainnya untuk bisa memperoleh perlindungan hukum harus didaftarkan terlebih dahulu ke lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>54</sup>

Dalam sistem perlindungan deklaratif yang memperoleh prioritas perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari investasi atau varietas baru yang ditemukan, dengan kata lain bukan pendaftaran yang menciptakan suatu hak tetapi

<sup>53</sup> ibid

<sup>54</sup> Abdul Kadir Muhamad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Aditya, Bandung, 2001, hlm. 120



menitik beratkan pemakaian pertama dari investasi atau varietas baru yang mencipkayakan atau menimbulkan hak tersebut.<sup>55</sup>

Menurut Yahya Harahap penegakan hukum berdasarkan kedua sistem perlindungan HKI diatas mengandung konsepsi sistem dualisme atau dalam hal ini terkadang masih terdapat pertentangan, disatu sisi menitik beratkan pada doktrin pendaftaran pertama atau *first to file principle* atau biasa disebut sistem pendaftaran konstitutif, dimana setiap pendaftar pertama dianggap mempunyai hak yang lebih utama dan lebih unggul dari inventor atau pemilik varietas lainnya, namun dilain pihak ada yang mendukung doktrin pemakai pertama atau *prior user (first to use system)* atau dengan kata lain pemakai pertama mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pendaftar pertama.<sup>56</sup> Hal ini berarti bahwa seorang yang sudah mendaftarkan invensinya atau varietasnya belum tentu akan dianggap berhak menggunakannya, sebab jika ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik pertama dari investasi atau varietas yang sama dengan investasi atau varietas yang didaftarkan, maka pihak yang mendaftarkan invensi atau varietas tersebut bisa dibatalkan.

Sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek yang bersangkutan.

Sistem pendaftaran deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan sistem konstitutif yang didasarkan atas pendaftar pertama yang lebih menjamin memberikan perlindungan hukum. Sistem pendaftar pertama

<sup>55</sup> Sudargo Gautama *Hukum Merek Indonesia*, PT,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.40.

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992*, Bandung, Citra Adityabakti, 1996, hlm 335.



atau biasa disebut *first to file principle*, setiap invensi atau varietas baru yang di daftarkan tentunya merupakan invensi dan varietas baru yang sudah memenuhi semua syarat-syarat yang ada untuk mendapatkan hak perlindungan secara hukum sebagai pendaftar pertama.<sup>57</sup> Dalam sistem deklaratif pendaftaran bukan merupakan suatu keharusan, bukan merupakan syarat mutlak bagi inventor atau pemulia untuk mendaftarkan invensi atau varietas barunya, karena menurut sistem ini pendaftaran hanya berfungsi untuk memudahkan pembuktian bahwa pihak yang bersangkutan pemilik sah sebagai pemakai pertama. Dianutnya Sistem deklaratif mempunyai akibat kurang menguntungkan untuk para pendaftar invensi di bidang HKI karena tidak ada kepastian hukum, sebab masih dimungkinkan adanya gugatan dari pihak lain dan apabila pihak lain dapat memberikan bukti yang lebih kuat bahwa dialah pemakai pertama atas suatu invensi maka dia menjadi pemilik sah dari invensi tersebut.

Sistem pendaftaran Konstitutif, merupakan sistem perlindungan hak yang menitik beratkan pada pendaftaran suatu invensi atau varietas baru agar dapat memperoleh hak dan perlindungan secara hukum, tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas invensi atau varietas tersebut, dengan kata lain bilamana terdapat pihak lain yang meniru atau menggunakan secara ilegal atas varietas baru atau invensi tersebut tidak ada tanggung jawab negara untuk melindungi. Pada sistem konstitutif perlindungan hukumnya di dasarkan atas pendaftar pertama yang beretika baik.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Jacki Ambadar dkk, *Mengelola Merek*, (Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007), hlm 79.

<sup>58</sup> Rachmadi Usman, op.cit., hlm. 326.



## **B.2. Analisis akibat hukum terhadap pemegang sertifikat Hak PVT apabila terdapat dua sertifikat Hak PVT yang berbeda tetapi ternyata varietas yang didaftarkan merupakan satu varietas yang sama secara visual dan genetik**

Dalam peraturan sendiri sudah dijelaskan secara jelas bahwa pemilik sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman mempunyai hak eksklusif atas varietas yang sudah didaftarkan, namun dalam perkembangan ilmu pertanian dan teknologi yang begitu canggih saat ini dimungkinkan seorang pemulia mempunyai varietas yang mirip dan sama dengan pemulia lainnya, oleh karena itu dibutuhkan seperangkat aturan hukum yang lebih tegas untuk mengatur serta diperlukan para penegak hukum yang betul-betul memahami suatu masalah hukum yang akan diselesaikannya.

Salah satu kasus yang ada beberapa tahun belakangan adalah terkait dengan kemiripan varietas oleh beberapa produsen benih, salah satu dari produsen benih tersebut sudah melaporkan masalah ini ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman adalah CV Aura Seed, dalam laporannya salah pihak perusahaan benih tersebut melaporkan keluhannya dan merasa hak eksklusifnya atas kepemilikan varietas tanaman secara hukum telah dilanggar, seperti yang ada dalam pasal 6 yang berbunyi seperti berikut ini:<sup>59</sup>

- (1) Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

<sup>59</sup> Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman



(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga untuk:

- a. Varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama;
- b. Varietas yang tidak bisa dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi;
- c. Sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1);
- d. Varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.

(3) Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) meliputi kegiatan:

- a. Memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. Menyiapkan untuk tujuan propagasi;
- c. Mengiklankan;
- d. Menawarkan;
- e. Menjual atau memperdagangkan;
- f. Mengekspor;
- g. Mengimpor;
- h. Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir a,b,c,d,e,f, dan g.

Dalam hal ini perusahaan benih yang melapor ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian merasa ada perusahaan benih lain yang sudah melanggar ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman seperti yang tersebut diatas.



Berdasarkan laporan dari salah satu perusahaan benih itu Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian sudah melakukan koordinasi dengan pengawas benih di daerah domisili pihak pelapor untuk memecahkan masalah ini dengan melakukan penanaman perdampingan atas seluruh varietas-varietas yang mirip dari produsen-produsen benih yang berbeda dan bila perlu akan dilakukan tes DNA atas seluruh varietas yang diduga mirip tadi untuk memastikan apakah varietas yang bersangkutan benar-benar sama dan identik.

Dilihat dari upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dengan melakukan penanaman berdampingan atas seluruh varietas-varietas dari beberapa produsen-produsen benih yang diduga mirip dan sama, dalam hal ini seperti melakukan uji keunikan ulang sama ketika uji permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman, hal tersebut mengindikasikan jika varietas-varietas yang sama dan mirip serta dimiliki oleh beberapa produsen benih yang berbeda mempunyai sertifikat hak Perlindungan Varietas tanaman yang berbeda, jika tidak mengapa Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Tanaman harus susah payah melakukan pengujian ulang, jika sertifikat tersebut hanya satu tentunya penyelesaiannya bukan uji keunikan ulang dan tes DNA atas varietas yang diduga mirip dan sama tersebut, tetapi upaya penyelesaiannya langsung dilakukan dipengadilan karena jika hanya satu pihak yang mempunyai hak Perlindungan Varietas Tanaman, maka terdapat salah satu pihak yang tidak memiliki hak Perlindungan Varietas Tanaman serta dapat dipastikan pihak tersebut telah menggunakan varietas secara ilegal.



Permasalahan sebenarnya yang muncul diatas adalah jika terdapat dua sertifikat hak Perlindungan Varietas Tanaman atas satu varietas yang sama dan mirip identik secara fisik dan DNA tetapi memiliki sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman lebih dari satu dan berbeda diskripsi varietasnnnya, dalam hal ini secara hukum tidak ada pihak yang bisa menuntut dan dituntut karena, kedua belah pihak mempunyai dasar hukum yang kuat atas kepemilikan varietas yang diduga mirip tersebut, dan lakah satu-satunya memang dengan cara pengujian keunikan ulang dan tes DNA.

Setelah bisa dipastikan bahwa kedua varietas yang diduga mirip tadi benar-benar mirip dan sama identik secara fisik maupun DNA konsekwensi hukum atas hal tersebut adalah pihak yang memiliki sertifikat hak Perlindungan Varietas Tanaman yang terbaru akan dicabut atau dibatalkan sertifikat hak Perlindungan Varietas Tanamannya, sedangkan pihak yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan tidak, Hal ini didasarkan atas prinsip *Firs to File* atau sistem pendaftaran Konstitutif yang dipakai dalam sitem pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari analisa dan pembahasan yang sudah diuraikan dibagian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan kriteria unik berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia untuk salah syarat memperoleh Hak Perlindungan Varietas Tanaman seperti dalam Undang-Undang No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman agak terlihat agak sulit diterapkan hal ini terlihat jelas dalam pasal 2 ayat (3). Dalam pasal 2 ayat (3) terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa “suatu varietas dianggap unik jika varietas tersebut bisa dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaanya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman”. Permasalahannya adalah sampai sejauh mana penentuan atau pemilihan varietas yang menjadi pengetahuan umum ini, apakah yang menjadi acuan seluruh varietas yang ada di dunia atau hanya varietas-varietas yang diketahui di Indonesia saja, tapi jika merujuk pasal 2 ayat (2) terdapat pernyataan “...belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari satu tahun atau telah diperdagangkan diluar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan”. Dari pernyataan pasal 2 ayat (2) tersebut terlihat bahwa batas penentuan varietas pembanding (varietas yang diketahui secara umum) tidak terbatas hanya



pada varietas-varietas yang diketahui secara umum di Indonesia, tetapi meliputi seluruh varietas yang ada di Dunia. Permasalahannya adalah bagaimana Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mencari sampel-sampel varietas pembanding berasal dari luar wilayah Indonesia untuk uji BUSS sementara sampai saat ini Indonesia belum menjadi anggota dari UPOV, hal ini kiranya menjadi perhatian Pemerintah Indonesia.

2. Kesimpulan yang kedua yang menyangkut masalah kemiripan satu varietas yang sama oleh dua orang pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman, dapat ditarik kesimpulan bahwa mungkin telah terjadi kealpaan atau kesalahan oleh para pemeriksa BUSS pada saat pemberian Hak PVT pada salah satu perusahaan tersebut, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan atau uji BUSS ulang, dan bilamana setelah pemeriksaan itu varietas-varietas yang diduga mirip tadi terbukti benar-benar mirip baik secara genetik atau visual sudah dapat dipastikan pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang paling baru akan dicabut Sertifikat Hak PVTnya hal tersebut didasarkan atas prinsip *firs to file* atau sistem pendaftaran konstitutif yang mana dalam asas ini suatu pemberian hak didasarkan atas pemohon hak pertama bukan didasarkan atas penggunaan invensinya, dalam prinsip *firs to file* pendaftaran varietas merupakan suatu keharusan agar varietas tersebut mendapatkan perlindungan secara hukum.



## B. Saran

Jadi Berdasarkan Analisa dan pembahasan yang sudah diuraikan seperti diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini kiranya lebih memperhatikan lagi undang-undang yang akan dibuat dan disahkan di Indonesia apalagi jika mengadopsi suatu peraturan perundang-undangan dari luar negeri, dalam Undang No 29 Tahaun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman hampir 80% materi muatan yang penting seperti persyaratan-persyaratan pemberian Hak PVT yang terkandung dalam undang-undang tersebut sama persis dengan materi muatan yang terkandung dalam Konvensi UPOV 1991 padahal sampai saat ini Indonesia masih belum menjadi anggota UPOV.
2. Para legislator dalam hal ini DPR bisa lebih peka lagi melihat isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat seperti masalah pengujian BUSS dalam syarat pemberian Hak PVT, Belajar dari UPOV selaku lembaga Internasional yang memayungi Hak Perlindungan Varietas Internasional sebaiknya dibuat suatu peraturan yang mengatur secara tersendiri mengenai pengujian varietas berdasarkan jenis-jenis dari varietas tersebut sehingga setiap jenis memiliki cara tersendiri dalam pengjian BUSS.
3. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian selaku lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Hak PVT kiranya benar-benar memperhatikan kebaruhan dan kunikan dari varietas tersebut sehingga di kemudian hari tidak terjadi



konflik kepentingan antara sesama pemegang Hak PVT, terlebih dalam proses uji BUSS sebainya Pusat PVTTP benar-benar mempertimbangkan varietas pembandingan yang akan digunakan untuk pengujian keunikan varietas tanaman baru yang dimohonkan Hak PVT.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Andriana Krisnawati, 2004, *Perlindungan Hukum Varietas Tanaman*, Jakarta, PT.

Raja Grafindo Persada.

Amir Makmur, 1992, *Pengantar Pemuliaan Tanaman*, Jakarta, Rineka Cipta.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi

Aksara.

Hasan Basri, 1994, *Dasar-Dasar Agronomi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Jhonny Ibrahim, 2005, *"Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif"*, Malang,

Bayu Publishing.

Krisnani Setyowati, 2001, *Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas*

*Tanaman, disampaikan pada training of the trainer Pengelola Gugus Hak*

*Kekayaan Intelektual*, Jakarta, tidak diketahui.

Mariam Darus Badruzaman, 1997, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*,

Bandung, BPHN-Alumni.

*Oxford Learner's Pocket Dictionary*, 2008, New York, Oxford University Press.

Peter Muhamad Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.



Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta,  
Pustaka Pelajar

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum (Paradikma Metode dan Dinamika  
Masalahnya)*, Jakarta, ELSAM dan HUMA.

Tim Lindsey, 2013, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar*,  
Bandung, PT.Alumni

### **Skripsi**

Ira Puspita Sari, **Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Petani  
Pemulia Tanaman Di Indonesia**, Skripsi diterbitkan 14 januari 2013,  
Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013

Novia Ujianty Silitonga, **Perlindungan Hukum Terhadap Varietas**, Skripsi  
diterbitkan, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008

### **Makalah, Artikel dan Jurnal**

Tantono Subagyo, 2001, **Perlindungan HKI Untuk Inovasi Dalam Biologi dan  
Pertanian**, Deputi Manajemen HKI, Disajikan Dalam Penyuluhan Undang-  
undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman,  
Deputi manajemen HKI, Kantor Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Alih  
Teknologi.



Tim Penelitian Hukum Kemenkumham, 2011, **Perlindungan Varietas Tanaman**

**Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional**, Jakarta,

Kemenkumham

Daniel Aling, 2010, **Perlindungan Paten Atas Varietas Baru Tanaman Pada**

**Sektor Pertanian di Indonesia**, Karya ilmiah diterbitkan secara online,

Manado, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

#### **Internet**

Smart click, **Letak Geografis Indonesia**, diakses dari <http://www.g-excess.com/letak-geografis-indonesia.html>, pada tanggal 10 Februari 2015

pukul 13.00

Iris Gera, **Presiden Jokowi: Swasembada Pangan, Salah Satu Cara Tekan**

**Impor**, VOA (Voice of Amerika) Bahasa Indonesia, diakses melalui

<http://www.voaindonesia.com/content/presiden-jokowi-swasembada-pangan-salah-satu-cara-tekan-impor/2563965.html>, pada tanggal 11 Februari

2015 pukul 15:44

Parida Anggreani, **Gebyar Benih Tanaman Pangan**, Dinas Pertanian Kabupaten

Rejang Lebong, diakses melalui

<http://pertanian.rejanglebongkab.go.id/gebyar-perbenihan-tanaman-pangan/>,

pada tanggal 12 Februari 2015 pukul 11:22



Green Indonesia, **Rice is not a water plant-part 5**, diakses melalui <http://greenindonesia.net/archives/date/2007/23>, pada tanggal 15 Febuari 2015 pukul 08:00.

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, **Koordinasi Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Bidang Tanaman**, diakses melalui [ppvt.setjen.deptan.go.id/ppvtp/berita-733-koordinasi-penanggulangan-pelanggaran-hak-kekayaan-intlektual-bidang-tanaman.html](http://ppvt.setjen.deptan.go.id/ppvtp/berita-733-koordinasi-penanggulangan-pelanggaran-hak-kekayaan-intlektual-bidang-tanaman.html), pada tanggal 16 Febuari 2015 pukul 10:12

DJHKI 2014, **Sekilas Sejarah Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**, TENTANG KAMI (online), <http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah>, diakses pada tanggal 17 Maret 2015

Rahayu Kartini, **Kajian Implementasi Prinsip-prinsip Perlindungan HKI Dalam Peraturan Per-UU-an HKI di Indonesia**, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/805>, diakses pada tanggal 17 Maret 2015

Redaksi, **Indonesia Perlu Perhatikan Hak Milik Intelektual**, Kompas, Jakarta, 19 Febuari 1996, hlm.1, diakses melalui [http:// www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id) pada tanggal 16 Maret 2015.



Kamus Besar Bahasa Indonesia, **Arti Kata Perlindungan**, Kamus Besar Bahasa

Indonesia *Versi Online/ daring( dalam jaringan, http://*

<http://kbbi.web.id/lindung>, diakses 16 Maret 2015

Suharyono, **Pengantar Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman**

**dan Perizinan Pertanian**, [http://](http://ppvt.setjen.pertanian.go.id/ppvtp/statis-14pengantarkepalapusat.html)

[http://ppvt.setjen.pertanian.go.id/ppvtp/statis-](http://ppvt.setjen.pertanian.go.id/ppvtp/statis-14pengantarkepalapusat.html)

[14pengantarkepalapusat.html](http://ppvt.setjen.pertanian.go.id/ppvtp/statis-14pengantarkepalapusat.html), diakses 19 Maret 2015

**Visi Pusat PVTTP**, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian, [http://](http://ppvt.setjen.pertanian.go.id/ppvtp/statis-14pengantarkepalapusat.html)

[14pengantarkepalapusat.html](http://ppvt.setjen.pertanian.go.id/ppvtp/statis-14pengantarkepalapusat.html), diakses 19 Maret 2015

**Misi Pusat PVTTP**, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian, [http://](http://ppvt.setjen.pertanian.go.id/ppvtp/statis-14pengantarkepalapusat.html)

[14pengantarkepalapusat.html](http://ppvt.setjen.pertanian.go.id/ppvtp/statis-14pengantarkepalapusat.html), diakses 19 Maret 2015

Tim Dosen HKI FH UB, **Perlindungan Varietas Tanaman**, Materi Kuliah FH

Universitas Brawijaya, [https://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/20](https://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2013/02/6-perlindungan-varietas-tanaman-edited-by-ranitya.pdf)

[13/02/6-perlindungan-varietas-tanaman-edited-by-ranitya.pdf](https://materikuliahfhunibraw.files.wordpress.com/2013/02/6-perlindungan-varietas-tanaman-edited-by-ranitya.pdf), diakses

pada 17 Maret 2015

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman



Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Treaty

*On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian

Mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian)

TRIPs Agreement (*Agreements of Trade Related Intellectual Property Rights*)

UPOV (*Union Internationale pour la des obtentions vegetale*)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha

Budidaya Tanaman

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/Pert/SR.120/2/2006 Tentang Syarat

Penanaman Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 37/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang

Pengujian, Penilaian , Pelepasan dan Perakitan Varietas

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang

Produksi,Sertifikasi dan Peredaran Benih

Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 443/Kpts/KU.330/7/2004 Tentang Biaya

Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman